



SALINAN



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2025;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 794);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo.
6. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan adalah dokumen penanggulangan kemiskinan untuk periode selama 1 (satu) tahun.
8. Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut LP2KD adalah laporan yang disusun TKPKD setiap tahunnya sebagai sarana monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah.
9. Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau Keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hakhak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat berdasarkan indikator kemiskinan Daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian dari Pemerintah.
10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah warga miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Pasal 2

Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 merupakan dokumen penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam upaya penanganan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada Tahun 2025.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUNAN PADA TAHUN SEBELUMNYA
 - BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI
 - BAB IV RENCANA AKSI TAHUNAN TAHUN 2025
 - BAB V PENUTUP
- (2) Uraian Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) TKPKD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024.
- (2) Pemantauan dan evaluasi kemiskinan dilakukan dengan menyusun LP2KD tiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemantauan dan evaluasi kemiskinan ekstrem dilakukan dengan menyusun Laporan Kemiskinan Ekstrem tiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Wakil Gubernur Jawa Timur selaku Ketua TKPK Provinsi Jawa Timur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 16 Desember 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

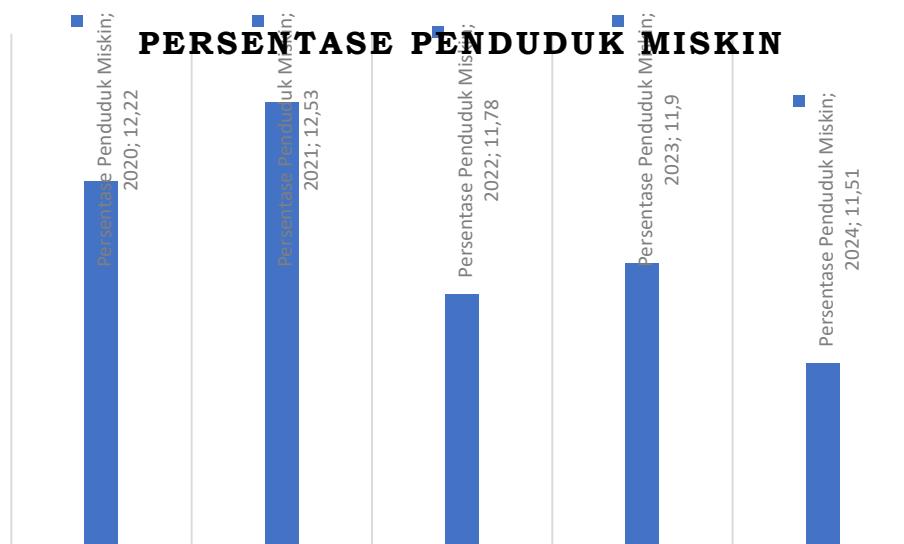
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi serta menjadi isu global, nasional bahkan lokal sehingga perlu menjadi prioritas pembangunan. Kemiskinan tidak hanya menggambarkan ketidak berdayaan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat sebagaimana yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Kompleksitas kemiskinan di Kabupaten Situbondo diperparah dengan adanya pandemi *Covid-19* menyebar di seluruh penjuru dunia termasuk juga melanda Indonesia selama hampir dua tahun. Selain berdampak sangat besar terhadap sektor kesehatan juga berdampak signifikan pada sektor lain, diantaranya adalah sektor ekonomi, sektor ketenagakerjaan, sektor sosial dan sektor pariwisata. Selama dua tahun adanya pandemi *COVID-19* menyebabkan terjadinya berbagai pergeseran dan dampak sehingga perlu adanya langkah taktis untuk mengatasi secara cepat permasalahan yang ditimbulkan.

Tantangan penangulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo saat ini adalah munculnya bebagai data kemiskinan berdasarkan versi masing-masing kementerian serta masih banyaknya exclusion dan inclusion error penerima program. Sehingga di dalam penanganannya diperlukan dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan jangka menengah atau yang biasa disebut dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026. Adanya dokumen tersebut dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah maupun stakeholder dalam mengurai persoalan kemiskinan yang kompleks menjadi lebih mudah untuk menentukan strategi dan arah kebijakan. Upaya penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan kolaboratif, holistik dan integratif serta mengacu pada dokumen RPKD yang didalamnya tertuang Langkah strategis pengurangan beban, peningkatan pendapatan dan penataan kawasan permukiman bagi masyarakat kurang sejahtera serta program

dan kegiatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sdm diarahkan lebih tepat sasaran, tepat guna dan tepat manfaat untuk keluarga kurang sejahtera efektif dan dapat menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Situbondo di tahun 2024 yakni 11,51 % di bandingkan dengan tahun 2023 yang berada di angka 11,9 %.



Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo

Tahun 2020 – 2029

Sumber: BPS Jawa Timur, 2024

Merujuk pada grafis di atas dapat difahami bahwa angka kemiskinan Situbondo di tahun 2024 11,51% dan menjadi capaian penurunan terbesar sepanjang enam tahun terakhir serta memberikan kontribusi penurunan angka kemiskinan provinsi Jawa Timur sebesar 4,02% serta berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan dibandingkan tahun 2021. Capaian kinerja positif tersebut tidak lepas dari adanya kolaborasi stakeholder pembangunan dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan melalui program pemberdayaan. Selain itu tidak kalah pentingnya adalah pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil yang saat ini mulai bangkit pasca Covid-19. Sedangkan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dilakukan melalui program Jaring Pengaman Sosial sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

Kendatipun demikian, untuk memastikan indikator-indikator yang memberikan pengaruh secara langsung terhadap dinamika kemiskinan seperti pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan,

infrastruktur dasar, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan telah ditetapkan sebagai prioritas dalam rencana intervensi dan anggaran setiap tahunnya serta memperhatikan dinamika sasaran penerima program untuk peningkatan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran dan pemenuhan lingkungan yang layak maka Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), dalam rangka untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang “Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota”, TKPKD mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup Kabupaten Situbondo melalui dokumen rencana aksi tahunan (RAT).

Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPKD dan di dalamnya memuat terkait evaluasi atas capaian kinerja, strategi dan program atau rencana aksi. Sebagai dokumen rencana kerja daerah yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyeleraskan program, kegiatan dan sub kegiatan multi sektoral yang tertuang di dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana kerja perangkat daerah (Renja), maka di dalam RAT Kemiskinan di tahun 2025 tertuang indikator dan target tahunan. Dengan demikian maka dapat dijadikan panduan bagi perangkat daerah dan stakeholder terkait dalam rangka mendukung upaya akselerasi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo.

1.2 Dasar Hukum

- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- 8 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 9 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 10 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;
- 13 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- 14 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- 15 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendataan, Pemutakhiran, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kemiskinan;
- 16 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2024 tentang Rencana Penangulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029.

1.3 Ruang Lingkup Dokumen

Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPKD yang memuat: (a) hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya; (b) kebijakan dan strategi tahun berjalan; (c) matriks target keberhasilan; dan (d) lokasi prioritas.

1.4 Tujuan

Tujuan di susunnya Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen turunan atau penjabaran dari RPKD serta untuk melakukan evaluasi kinerja penanggulangan kemiskinan sepanjang tahun 2025;
2. Menjabarkan strategi dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo dengan ruang lingkup intervensi kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Menjadi acuan perangkat daerah dalam penentuan lokasi sasaran implementasi program serta menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan atas pencapaian target indikator maupun penurunan angka kemiskinan.
4. Meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten Situbondo, masyarakat, media massa, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam kolaborasi untuk akselerasi penurunan kemiskinan di tahun 2025.

1.5 Sasaran

Sasaran dari Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
2. Instansi Vertikal;
3. Masyarakat Kabupaten Situbondo;

4. Media Massa;
5. Organisasi Kemasyarakatan atau Non Govermental Organization (NGO); dan
6. Dunia usaha.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

bab II : Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan Pada
Tahun Sebelumnya

bab III : Kebijakan Dan Strategi

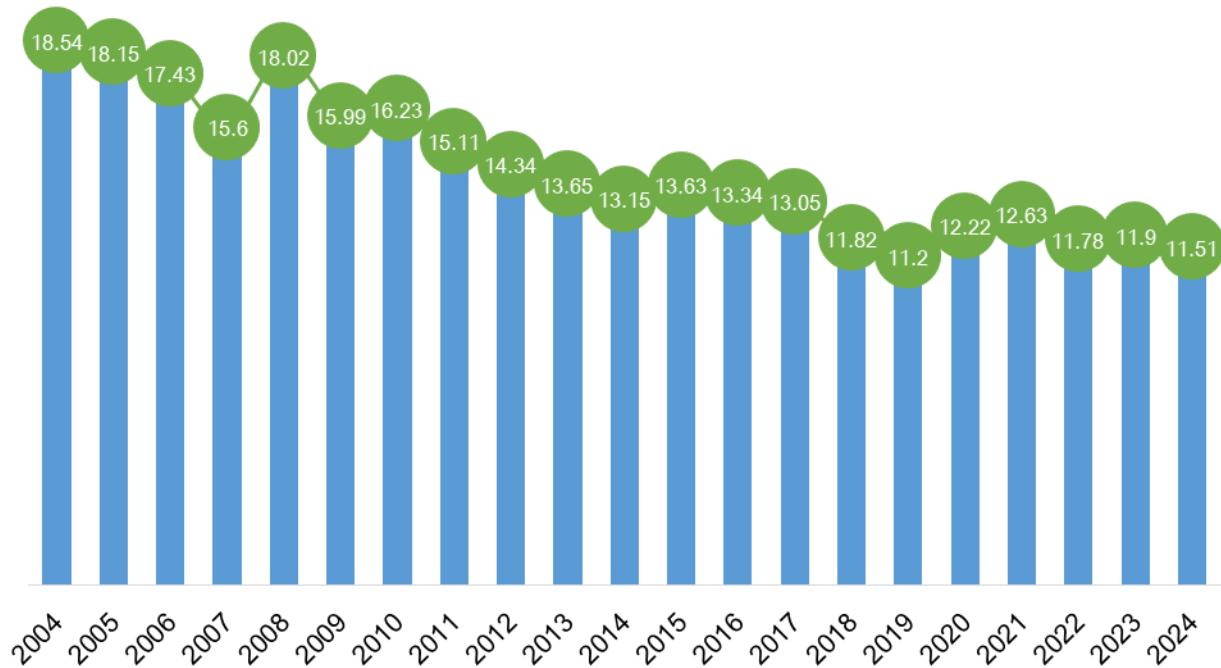
bab IV : Rencana Aksi Tahunan Tahun 2025

bab V : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUNAN
PADA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Kondisi Umum Kemiskinan Kabupaten Situbondo

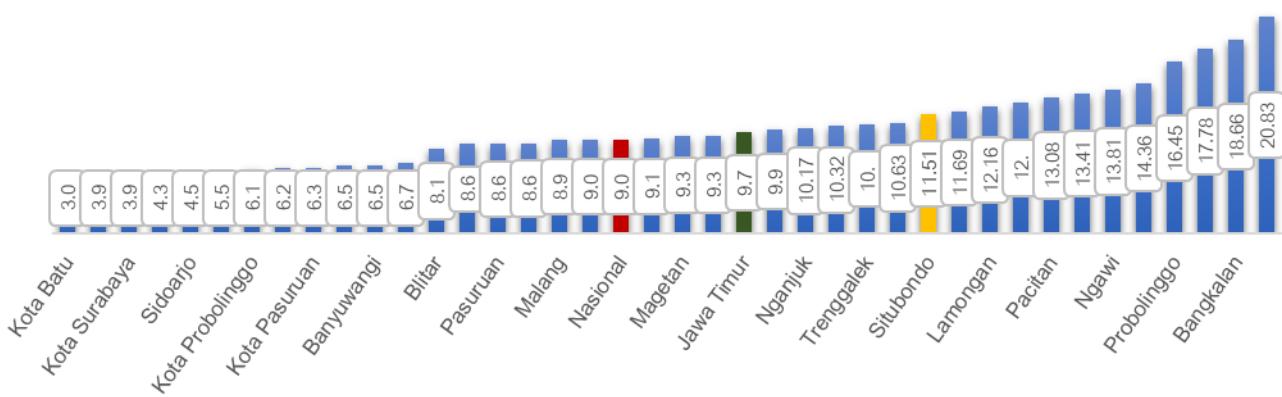
Indikator persentase penduduk miskin merupakan alat penting dalam menilai tingkat kemiskinan di suatu wilayah, termasuk Kabupaten Situbondo. Indikator ini mencerminkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan memahami persentase ini, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang paling membutuhkan intervensi dan merancang program yang lebih efektif untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi. Selain itu, indikator ini juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi keberhasilan program pengentasan kemiskinan dan menyesuaikan strategi yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Situbondo, seperti di banyak wilayah lainnya, tren perubahan dalam persentase penduduk miskin dapat memberikan wawasan tentang dampak dari kebijakan ekonomi, sosial, dan pembangunan yang diterapkan selama periode tertentu.



Gambar 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2004 - 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2024

Kabupaten Situbondo telah menunjukkan kemajuan yang berarti dalam mengurangi tingkat kemiskinan selama dua dekade terakhir. Pada tahun 2004, persentase penduduk miskin di kabupaten ini mencapai 18,54%, sebuah angka yang mencerminkan tantangan penanggulangan kemiskinan yang signifikan. Namun, dengan upaya yang terus-menerus dari pemerintah daerah dan berbagai program pengentasan kemiskinan, angka ini berhasil ditekan hingga mencapai 11,51% pada tahun 2024. Penurunan ini tidak hanya menunjukkan efektivitas kebijakan sosial dan ekonomi setempat, tetapi juga partisipasi aktif komunitas dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Program peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja menjadi faktor kunci dalam tren penurunan ini.



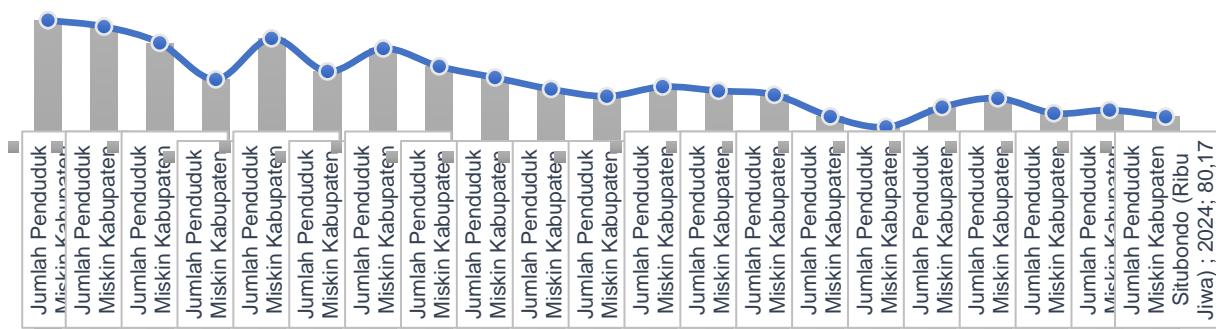
Gambar 2.2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2024

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Pusat, 2024

Meskipun demikian, persentase penduduk miskin Kabupaten Situbondo yang mencapai 11,51% pada tahun 2024 masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 9,79% dan rata-rata nasional yang sebesar 9,03%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Situbondo dalam upayanya untuk mencapai angka kemiskinan yang lebih rendah. Dibutuhkan strategi yang lebih terintegrasi dan inovatif untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan investasi di sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja baru serta penguatan program-program pemberdayaan masyarakat lokal menjadi langkah penting untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan di masa mendatang.

Jumlah penduduk miskin juga merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai tingkat kemiskinan di suatu wilayah, termasuk Kabupaten Situbondo.

Angka ini menggambarkan jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan, memberikan gambaran konkret tentang seberapa luas masalah kemiskinan di daerah tersebut. Namun, untuk memahami tingkat kemiskinan secara lebih komprehensif, penting untuk mempertimbangkan variabel jumlah penduduk total. Sebuah wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang besar mungkin memiliki persentase kemiskinan yang rendah jika populasinya sangat besar, dan sebaliknya. Oleh karena itu, analisis yang efektif harus memperhitungkan baik jumlah absolut penduduk miskin maupun proporsi mereka terhadap total populasi. Hal ini membantu pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merancang intervensi yang tepat sasaran, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di Situbondo, memahami dinamika ini memungkinkan pendekatan yang lebih berdampak dalam program pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial.

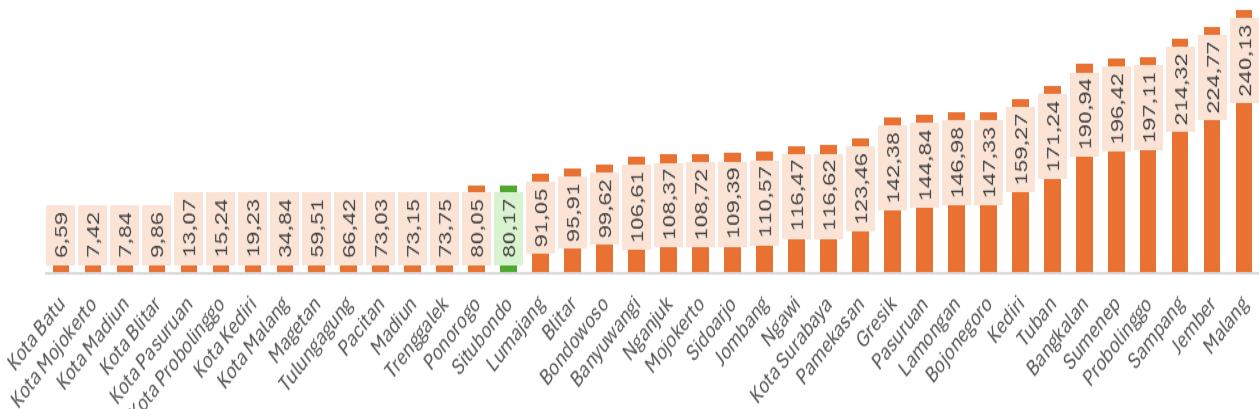


Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo
Tahun 2004 - 2024 (Ribu Jiwa)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2024

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo menunjukkan tren penurunan yang positif dari tahun 2004 hingga 2024. Pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin masih mencapai 115.500 jiwa, namun angka ini berhasil diturunkan hingga menjadi 80.170 jiwa pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya progres dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo, yang didukung oleh program-program pemerintah dan kebijakan lokal yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun begitu, meski ada penurunan jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo masih memiliki urgensi yang tinggi untuk ditangani secara lebih

efektif, mengingat bahwa angka kemiskinan ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Timur dan nasional.



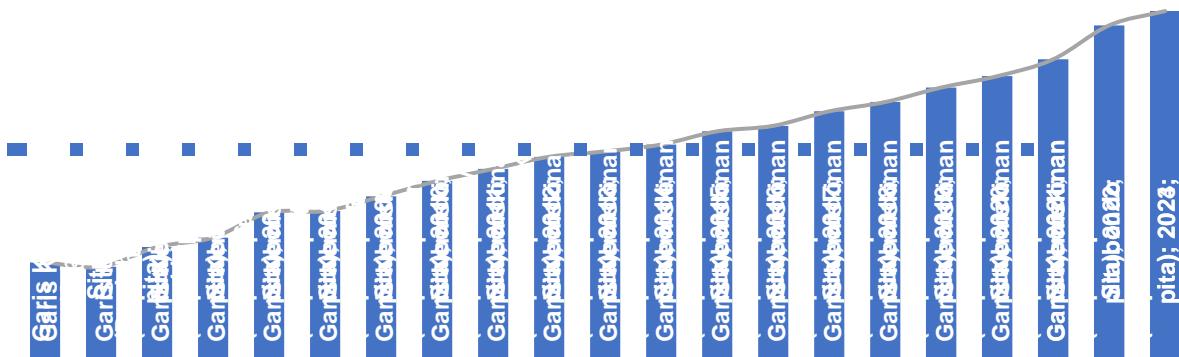
Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Ribu Jiwa)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

Meskipun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga mencapai 80.170 jiwa pada tahun 2024, angka ini masih menempatkan Situbondo di posisi ke-24 dari 38 kabupaten/ kota di Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Posisi ini tepat berada di bawah Kabupaten Lumajang dan di atas Kabupaten Ponorogo, menunjukkan bahwa kemiskinan di Situbondo masih menjadi tantangan signifikan dibandingkan dengan banyak daerah lainnya di provinsi Jawa Timur. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun ada kemajuan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, upaya yang lebih intensif dan terfokus masih sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar penurunan jumlah penduduk miskin dapat lebih cepat dan sejalan dengan target-target pembangunan sosial-ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Bila melihat pada garis kemiskinan di Kabupaten Situbondo dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pendapatan yang diperlukan oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, sandang, papan, dan kebutuhan hidup lainnya. Dengan menganalisis garis kemiskinan, pemerintah dapat lebih akurat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang berada di bawah atau di sekitar batas ini, sehingga strategi dan intervensi yang tepat dapat disusun. Pemahaman yang mendalam tentang garis kemiskinan di Kabupaten Situbondo sangat penting untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan terarah, guna mengurangi jumlah penduduk

miskin, meningkatkan kesejahteraan, dan mencapai target pembangunan berkelanjutan.



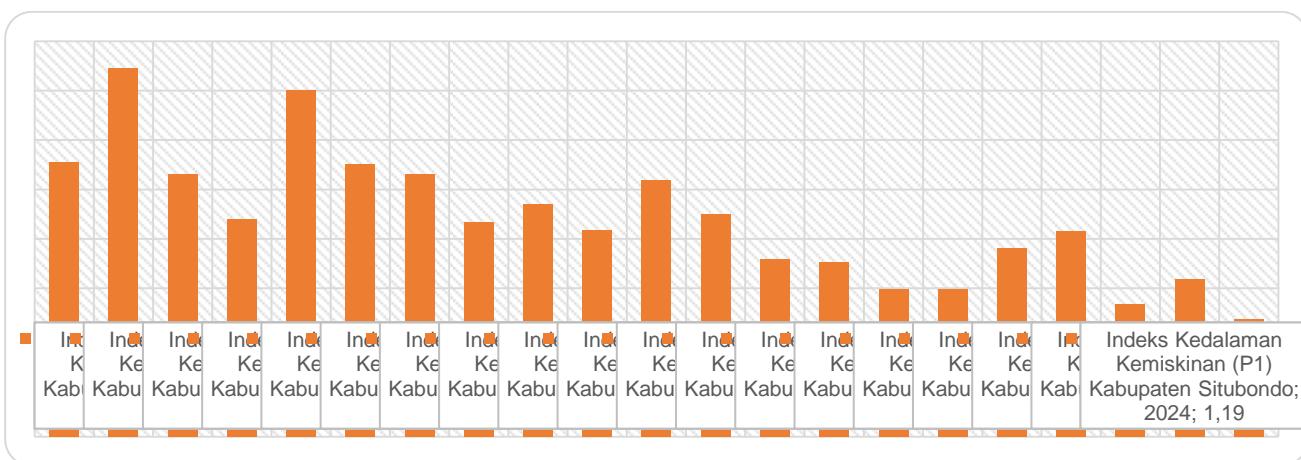
Gambar 2.5 Garis Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2004 - 2024
(Rupiah/ Bulan/ Kapita)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2024

Selama periode 2004 hingga 2024, Garis Kemiskinan di Kabupaten Situbondo menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2004, garis kemiskinan berada di angka 114.362, kemudian mengalami penurunan sedikit pada tahun 2005 menjadi 109.096. Namun, sejak 2006, garis kemiskinan terus meningkat, mencapai 132.613 pada tahun 2007 dan 192.862 pada tahun 2010. Pertumbuhan ini terus berlanjut, dengan garis kemiskinan mencapai 240.085 pada 2012 dan naik lebih lanjut hingga 305.280 pada 2018. Pada tahun 2024, garis kemiskinan mencapai 413.611. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan biaya hidup dan kebutuhan dasar masyarakat, yang mengharuskan penyesuaian kontinu untuk menentukan intervensi kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemiskinan di Situbondo.

Sebagai upaya memotret kondisi kemiskinan Kabupaten Situbondo secara lebih komprehensif, identifikasi tingkat kedalaman kemiskinan menjadi salah satu pertimbangan penting. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah indikator yang esensial dalam menilai kondisi kemiskinan di suatu wilayah secara lebih mendalam, termasuk di Kabupaten Situbondo. Indeks ini mengukur seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sehingga memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan dan kebutuhan untuk intervensi kebijakan. Dalam konteks penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah selama lima tahun ke depan, hasil identifikasi Kedalaman Kemiskinan menjadi alat strategis untuk menentukan prioritas dan alokasi sumber daya yang lebih tepat.

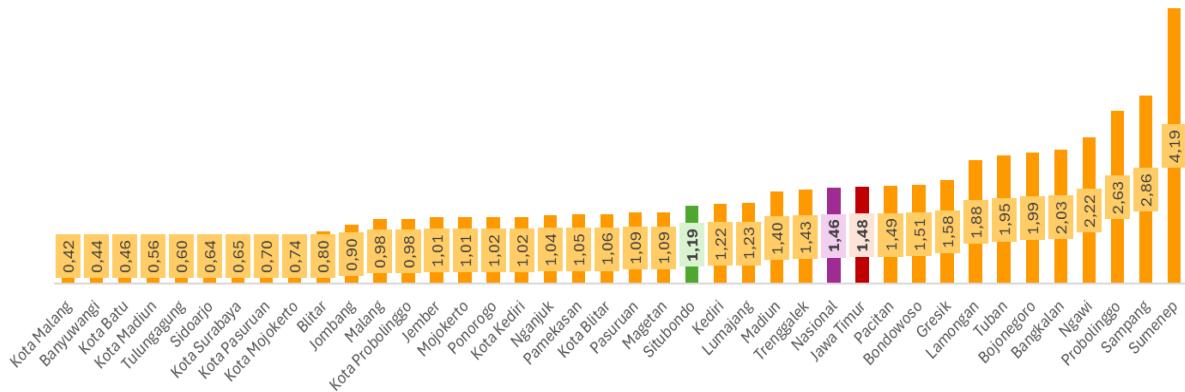
Dengan memahami kedalaman kemiskinan melalui P1, pemerintah daerah dapat merancang program bantuan yang lebih terarah, seperti pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta dukungan finansial langsung yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil identifikasi Kedalaman Kemiskinan tidak hanya membantu dalam memetakan kondisi kemiskinan secara lebih akurat tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 2.6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Situbondo Tahun 2004 - 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2024

Selama 20 tahun terakhir, tren Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Situbondo menunjukkan fluktuasi yang signifikan namun cenderung menurun secara keseluruhan. Pada tahun 2004, indeks ini berada di angka 2,78 dan mencapai puncaknya pada tahun 2006 dengan nilai 3,73. Setelah itu, terjadi beberapa penurunan dan kenaikan, seperti pada tahun 2008 dengan angka 3,51 dan penurunan bertahap hingga tahun 2013 mencapai 2,09. Dalam lima tahun terakhir, tren ini semakin menurun, dengan penurunan tajam dari 1,91 pada tahun 2020 menjadi 1,19 pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan respons terhadap berbagai kebijakan sosial-ekonomi yang diterapkan, serta tantangan eksternal yang dihadapi selama periode tersebut, namun secara keseluruhan, terdapat progres yang menunjukkan efektivitas strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo dalam beberapa tahun terakhir.



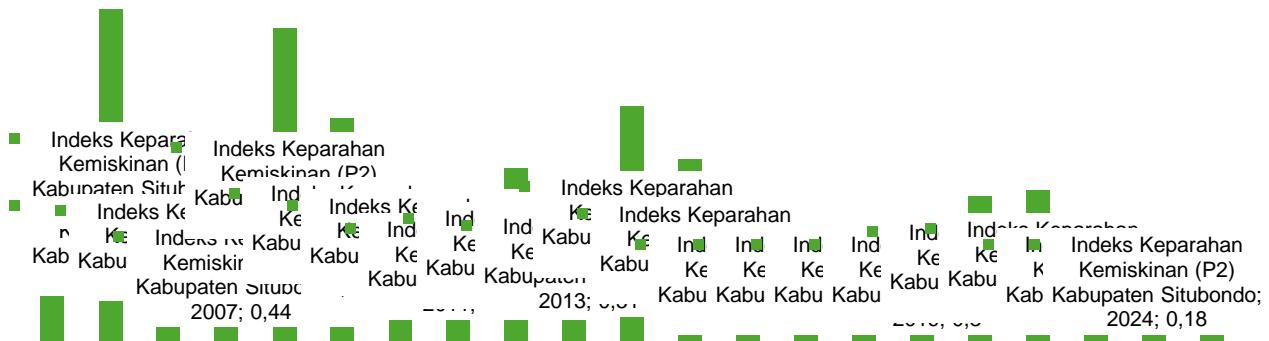
Gambar 2.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Pusat, 2024

Sedangkan secara komparatif, pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Situbondo yang mencapai 1,19, berhasil menempatkannya relatif lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten/ kota lain di Jawa Timur. Situbondo memiliki P1 yang lebih rendah dari rata-rata provinsi Jawa Timur, yang berada di angka 1,46, dan juga lebih baik dari rata-rata nasional yang sebesar 1,48. Dalam konteks Jawa Timur, Situbondo berada di antara kabupaten/ kota dengan indeks yang lebih rendah, menunjukkan keberhasilan dalam upaya pengentasan kemiskinan dibandingkan wilayah lain seperti Sumenep dan Sampang yang memiliki P1 tertinggi. Posisi ini pada akhirnya juga dapat mencerminkan efektivitas strategi dan kebijakan yang diterapkan di Situbondo dalam mengurangi kedalaman kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah indikator penting yang memberikan gambaran lebih komprehensif tentang kondisi kemiskinan di suatu wilayah, termasuk Kabupaten Situbondo. Indikator ini mengukur distribusi kemiskinan dengan memperhitungkan ketimpangan di antara penduduk miskin, sehingga tidak hanya menunjukkan seberapa jauh mereka berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga seberapa berat ketimpangan di antara mereka. Dalam konteks penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah selama lima tahun ke depan, Identifikasi Keparahan Kemiskinan menjadi alat strategis untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan memahami keparahan kemiskinan melalui Identifikasi Keparahan Kemiskinan, pemerintah daerah dapat mengembangkan program yang tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga mengurangi ketimpangan di antara penduduk miskin melalui intervensi yang lebih

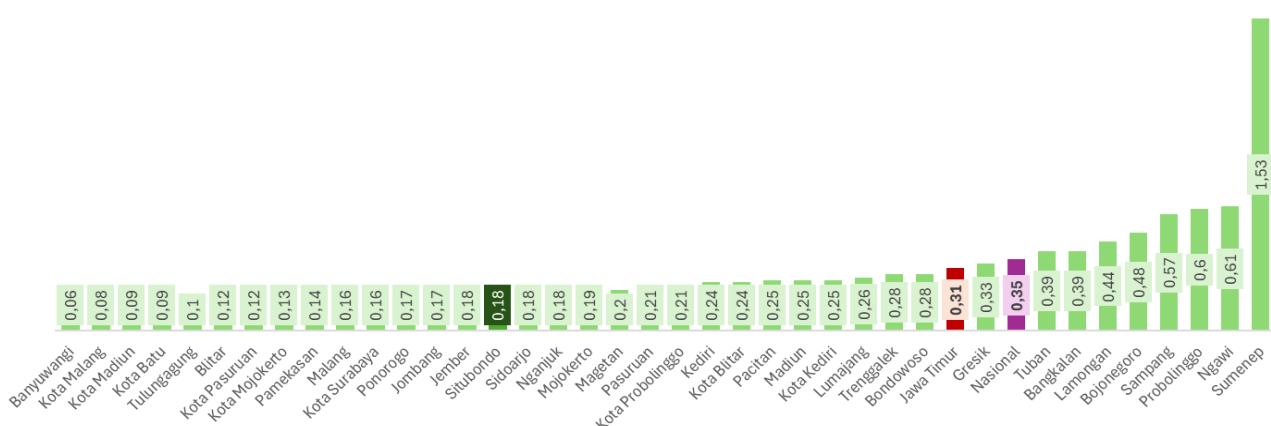
spesifik, seperti peningkatan akses terhadap layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, P2 berfungsi sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan adil.



Gambar 2.8 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Situbondo Tahun 2004 - 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2024

Selama 2 dekade terakhir, tren Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Situbondo menunjukkan penurunan yang konsisten, meskipun mengalami beberapa fluktuasi. Pada tahun 2004, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Situbondo berada di angka 0,64 dan mencapai puncaknya di tahun 2006 dengan 1,07. Setelah itu, terjadi penurunan signifikan, meskipun sempat naik kembali pada tahun 2008 mencapai 1,01. Sejak tahun 2012, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Situbondo terus menunjukkan penurunan stabil, dengan angka 0,56 pada tahun 2013 dan kemudian turun menjadi 0,39 pada tahun 2016. Tren penurunan ini berlanjut hingga tahun 2024, mencapai titik terendah di 0,18. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang diterapkan di Situbondo, menandakan berkurangnya ketimpangan di antara penduduk miskin dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.



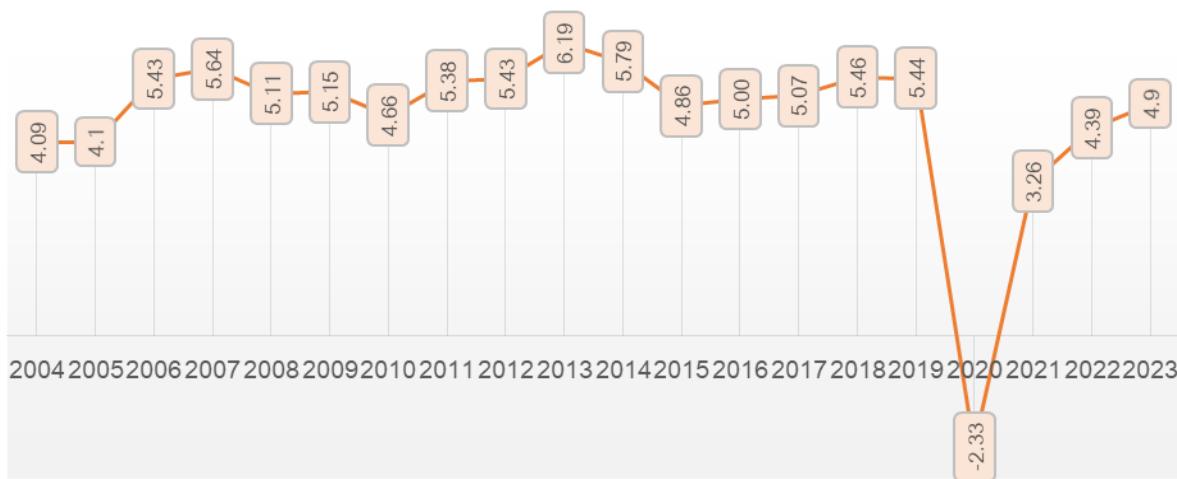
Gambar 2.9 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Pusat, 2024

Pada tahun 2024, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Situbondo mencapai 0,18, menunjukkan posisi yang cukup baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Timur yang berada di angka 0,33 dan juga di bawah rata-rata nasional yang sebesar 0,35. Situbondo berhasil mempertahankan indeks yang lebih rendah dari banyak daerah lain, seperti Sumenep yang memiliki P2 tertinggi sebesar 1,53. Capaian ini mencerminkan efektivitas program dan kebijakan pengentasan kemiskinan di Situbondo, menegaskan keberhasilan dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Evaluasi Bidang Produktivitas Ekonomi

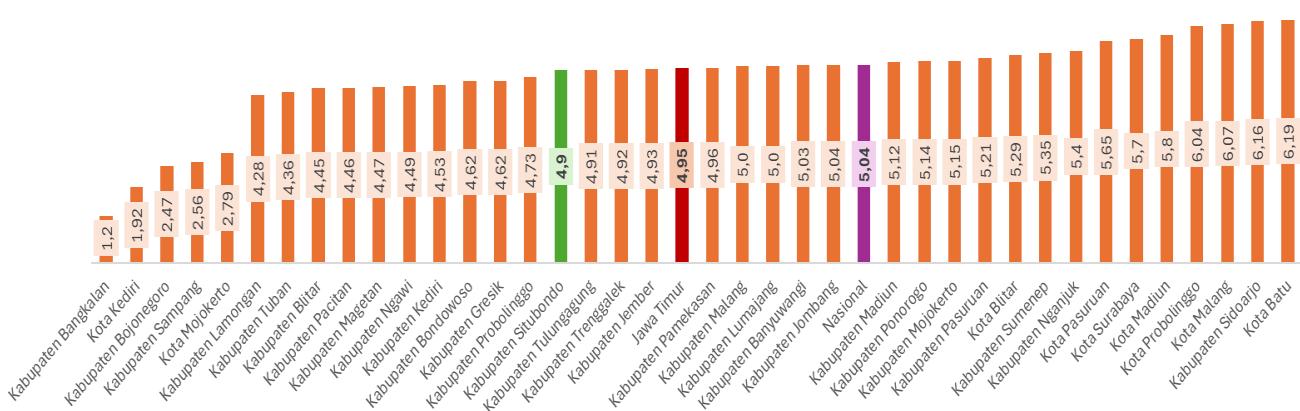
Aspek perekonomian memainkan peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah, di mana aspek ini dapat dilihat melalui berbagai indikator makro ekonomi seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi hingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, yang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tingkat inflasi yang terkendali juga penting karena inflasi yang tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, sehingga memperburuk kondisi kemiskinan. Selain itu, PDRB per kapita yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih baik di suatu daerah, menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, peningkatan indikator-indikator perekonomian daerah ini menjadi faktor kunci dalam upaya mengurangi kemiskinan dengan menciptakan kondisi yang lebih stabil dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.



Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo
Tahun 2004 - 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2024

Dalam rentang tahun 2004 - 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo mengalami tren yang cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Meskipun demikian, apabila dicermati secara spesifik dalam rentang waktu 3 tahun terakhir pasca terjadinya pandemi (2021 - 2023), laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo telah mencapai kondisi yang semakin baik dengan peningkatan konsisten setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Situbondo sedang bergerak ke arah yang lebih baik, dengan berbagai sektor ekonomi yang mulai bangkit dan berkembang. Konsistensi dalam pertumbuhan ekonomi ini juga dapat menjadi indikator bahwa Kabupaten Situbondo memiliki potensi untuk memperluas basis ekonominya dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di masa depan. Dengan kondisi ini, peluang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan peningkatan pendapatan masyarakat dapat terealisasi dalam lima tahun mendatang, mengingat dinamika ekonomi yang terus membaik dan terbuka terhadap investasi serta pengembangan sektor-sektor baru.



Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

Sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo di tahun 2023 yang sebesar 4,9% masih berada di bawah rata-rata keduanya, dengan capaian rata-rata provinsi sebesar 4,95% dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04%. Hal ini menandakan bahwa meskipun perekonomian Kabupaten Situbondo sedang bergerak ke arah yang lebih baik dengan berbagai sektor ekonomi yang mulai bangkit dan berkembang, ada kebutuhan untuk mempercepat laju pertumbuhan agar dapat sejajar atau melampaui capaian regional dan nasional. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan dan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, intervensi kebijakan yang diperlukan antara lain memperkuat produktivitas sektor-sektor unggulan yang sedang berkembang, meningkatkan infrastruktur ekonomi, dan mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan vokasional, serta pemberian insentif bagi usaha kecil dan menengah, sangat penting untuk memperluas basis ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

Di sisi lain, Tingkat inflasi yang terkendali juga sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, karena inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Di Kabupaten Situbondo, menjaga inflasi tetap terkendali menjadi prioritas untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Jika inflasi dibiarkan naik tanpa kendali, masyarakat miskin akan lebih terpukul karena mereka menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan energi.

Tingkat inflasi di Kabupaten Situbondo dilihat melalui capaian inflasi di daerah dengan karakteristik yang identik dan memiliki kedekatan geografis dengannya, yaitu Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dikarenakan, tidak semua daerah di Provinsi Jawa Timur menjadi sampel perhitungan tingkat inflasi

yang dilakukan oleh Banda Pusta Statistik, sehingga perlu menjadikan capaian inflasi salah satu dari 8 Kabupaten/ Kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi di Jawa Timur sebagai tolok ukur pengendalian inflasi Kabupaten Situbondo.



Gambar 2.12 Inflasi Tahun ke Tahun Kabupaten Situbondo (Per Bulan Januari) Tahun 2004 - 2024

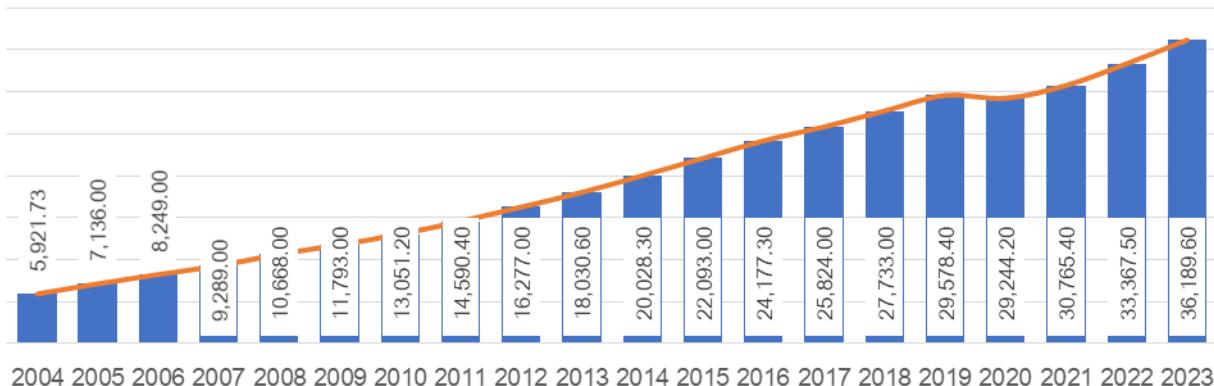
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

Selama 20 tahun terakhir (2004 - 2024), tingkat inflasi dari tahun ke tahun (Year of Year) Kabupaten Situbondo mengalami fluktuasi yang dinamis dengan kecenderungan meningkat. Tren semacam ini sangat lumrah terjadi, mengingat inflasi di tingkat nasional pun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dinamika fluktuasi tingkat inflasi di Kabupaten Situbondo sejatinya juga dapat menjadi cerminan bahwa Kabupaten Situbondo sejauh ini berhasil mengendalikan inflasinya dengan baik sehingga tidak mengalami inflasi berlebihan serta juga tidak mengalami deflasi yang berlebihan.

Jika melihat dari tren pengendalian inflasinya, upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo perlu fokus pada strategi yang sejalan dengan program nasional untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Salah satu caranya adalah dengan menjaga stabilitas harga melalui kebijakan pengendalian inflasi yang efektif. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, serta mendukung produksi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Selain itu, pemberian subsidi atau bantuan langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat menjadi langkah strategis untuk meringankan beban pengeluaran mereka. Dengan mengurangi tekanan biaya hidup, daya beli masyarakat dapat terjaga, yang pada gilirannya akan meningkatkan

kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo secara signifikan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih baik di suatu daerah karena menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata yang diperoleh masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Di Kabupaten Situbondo, indikator PDRB per kapita juga menjadi salah satu fokus utama dalam pertimbangan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Upaya yang dilahirkan dari pertimbangan ini dapat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan yang berpotensi tinggi, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kecil-menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan dari sektor-sektor ini, diharapkan pendapatan per kapita masyarakat juga akan meningkat. Selain itu, memperluas kesempatan kerja dan akses terhadap pendidikan serta pelatihan keterampilan juga penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan PDRB per kapita dapat berkontribusi langsung terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Situbondo.

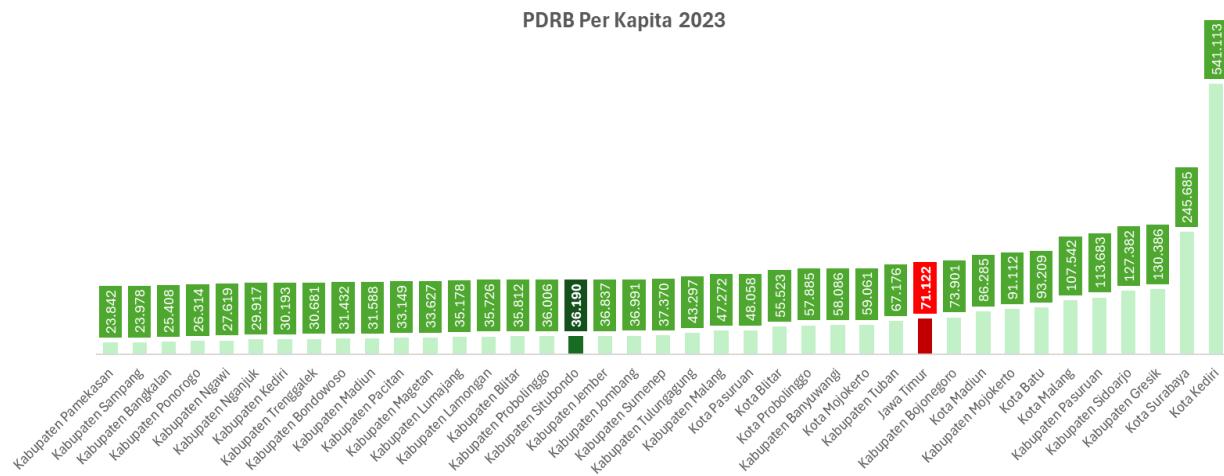


Gambar 2.13 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Situbondo Tahun 2004 - 2023 (Ribu Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2024

Dari tahun 2004 sampai tahun 2023, PDRB Per Kapita Kabupaten Situbondo mengalami tren capaian yang positif berupa kenaikan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Di tahun 2004, PDRB per kapita Kabupaten Situbondo masih berkisar di angka Rp. 5 juta rupiah/ tahun, sebelum mengalami kenaikan gradual hingga mencapai kisaran Rp. 36 juta di tahun

2023. Kenaikan ini mencerminkan bahwa ekonomi Kabupaten Situbondo berkembang dan masyarakatnya semakin mampu memenuhi kebutuhan pokok serta menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Tren peningkatan ini juga menunjukkan bahwa upaya untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri kecil-menengah mungkin telah memberikan hasil yang signifikan, dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.



Gambar 2.14 PDRB Perkapita Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Ribu Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

Meskipun PDRB per kapita Kabupaten Situbondo mengalami tren peningkatan yang konsisten selama periode 2004 - 2023, dengan capaian sebesar Rp. 36.190.000 pada tahun 2023, angka ini masih berada di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur yang mencapai Rp. 71.122.000. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi Kabupaten Situbondo berkembang dan masyarakatnya mulai mampu memenuhi kebutuhan pokok serta menikmati kualitas hidup yang lebih baik, tingkat kesejahteraan ekonomi di daerah ini masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Hal ini dapat berdampak pada upaya penanggulangan kemiskinan, di mana diperlukan strategi lebih lanjut untuk mendorong peningkatan pendapatan secara lebih merata di seluruh sektor ekonomi lokal. Untuk mengatasi kesenjangan ini, Kabupaten Situbondo perlu terus memperkuat sektor-sektor ekonomi potensial, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan produktivitas serta daya saing lokal. Dengan demikian, manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas dan berkontribusi lebih signifikan dalam pengurangan kemiskinan di masa depan.

2.3 Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) menjadi indikator penting dalam mengukur pembangunan manusia yang diaplikasikan di banyak negara, begitu juga di Indonesia. Pada tahun 2010, UNDP secara resmi memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru, dengan alasan bahwa indikator dan metode baru lebih mampu untuk mengukur pembangunan manusia. Metode baru diterapkan dengan menggunakan indikator baru dalam penghitungan IPM. Pada metode baru indikator angka melek huruf dan gabungan angka partisipasi kasar diganti dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan indikator PDB per Kapita juga diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per Kapita. Selain itu, penghitungan rata-rata indeks juga dirubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Indonesia mulai mengaplikasikan penghitungan IPM dengan metode baru pada tahun 2014. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak dan masing-masing dimensi direpresentasikan oleh indikator. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut disajikan data mengenai perkembangan IPM Kabupaten Situbondo dari tahun 2005 hingga 2023.



Gambar 2.15 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 - 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Pusat, 2024

Dalam kurun 18 tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Situbondo cenderung mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2010 yang mengalami penurunan dari 63,69 pada tahun 2009 menjadi 60,07. Salah satu faktor penyebab penurunan ini adalah perubahan metode IPM. Perlu diketahui bahwa metode IPM telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali sejak diterbitkan tahun 1990. Pasca 2010, nilai IPM Kabupaten Situbondo terus mengalami kenaikan secara konsisten sampai mencapai skor 69,16 pada tahun 2023.

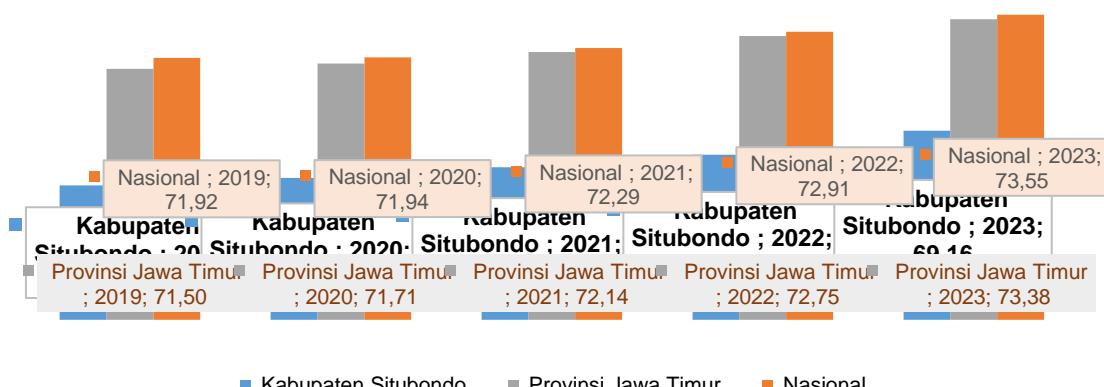
IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Situbondo bila melihat pada kondisi 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 hingga 2023 mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya dari 67,09 menjadi 69,16 atau naik sekitar 2,07 poin (3,09%). Pertumbuhan IPM tertinggi selama tahun 2019 hingga 2023 terjadi pada tahun 2023 yang mencapai 1,33% atau 0,91 poin, dimana terjadinya kenaikan pada tahun tersebut lebih ditunjang oleh peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yaitu sebanyak 0,32 Tahun untuk AHH dan 0,27 Tahun untuk RLS. Selain itu untuk Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan dari Rp. 10.263 ribu pada tahun 2022 menjadi Rp. 10.702 ribu. Seiring dengan kenaikan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terjadi dalam setiap tahun telah mampu membawa Kabupaten Situbondo memiliki status pembangunan manusia yang lebih baik, dimana pada tahun 2019 hingga 2023 status pembangunan manusia di Kabupaten Situbondo menurut PBB (UNDP) sudah termasuk dalam kategori sedang, bahkan pada tahun 2023 dengan nilai IPM yang mencapai 69,16 Kabupaten Situbondo mampu mempertahankan status tersebut dan mendekati/ menuju kategori tinggi.

Terjadinya kenaikan angka IPM memberikan makna bahwa kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan yang cukup berarti dan menunjukkan kondisi yang semakin baik. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan keseluruhan indeks komponen pembentuk IPM, yaitu indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Kenaikan yang terjadi pada indeks komponen IPM ini menggambarkan bahwa adanya dampak positif dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Bila angka IPM Kabupaten Situbondo dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Jawa Timur, maka dapat diketahui bahwa angka IPM Kabupaten

Situbondo secara umum dalam lima tahun terakhir masih lebih rendah. Semenjak tahun 2020 hingga 2022 perbedaan/ selisih antara IPM Kabupaten Situbondo dengan Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 perbedaan angka mencapai 4,41, sedangkan pada tahun 2019 hingga 2022 mengalami peningkatan sehingga pada tahun tersebut selisihnya menjadi 4,50 dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 4,22. Semakin rendahnya selisih angka IPM Kabupaten Situbondo dengan Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa kondisi IPM Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 memiliki kondisi yang semakin baik dibandingkan dengan sebagian besar daerah lain (kabupaten/ kota) di Provinsi Jawa Timur. Bila angka IPM Kabupaten Situbondo dibandingkan dengan angka IPM Nasional dapat terlihat bahwa posisi Kabupaten Situbondo dalam lima tahun terakhir masih berada di bawah nasional dengan selisih setiap tahunnya yang berfluktuasi. Pada tahun 2019 selisih angka IPM Kabupaten Situbondo dengan nasional mencapai 4,83, sedangkan pada tahun 2019 hingga 2021 memiliki selisih yang semakin menurun, yaitu menjadi 4,51 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 selisih nilai IPM antara Kabupaten Situbondo dengan Nasional mengalami peningkatan menjadi 4,66. Pada tahun 2023 selisih nilai IPM antara Kabupaten Situbondo dengan Nasional mengalami penurunan menjadi 4,39.

Semenjak tingginya pertumbuhan angka IPM Kabupaten Situbondo yang terjadi pada tahun 2023 menyebabkan selisih antara IPM Kabupaten Situbondo dengan nasional semakin kecil. Semakin kecilnya selisih antara angka IPM Kabupaten Situbondo dengan nasional menyebabkan Kabupaten Situbondo dapat masuk pada posisi di atas rata-rata nasional. Untuk mengetahui perkembangan nilai IPM Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut.

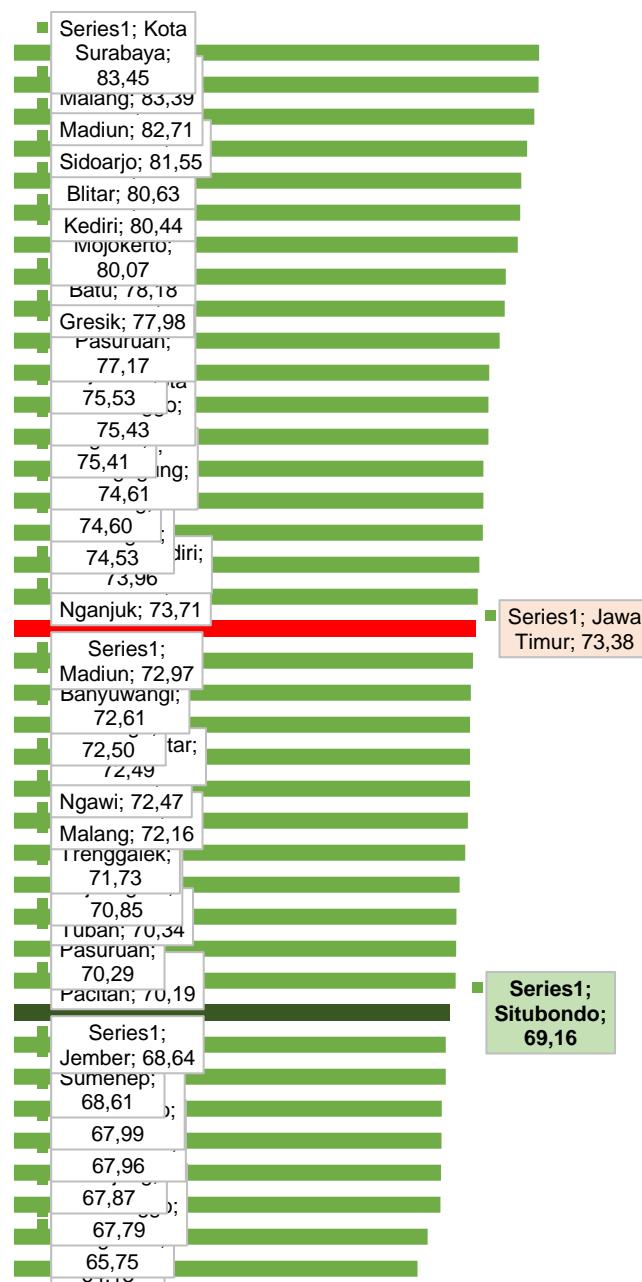


Gambar 2.16 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Tahun 2019 - 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Pusat, 2024

Posisi IPM Kabupaten Situbondo dibandingkan dengan sebagian besar daerah lain (kabupaten/ kota) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 berada pada peringkat 30 dari seluruh kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, yaitu berada diatas Kabupaten Jember, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sampang. Selain Kabupaten Situbondo, pada tahun 2023 di Provinsi Jawa Timur terdapat 18 kabupaten/ kota yang memiliki nilai IPM berada di atas Provinsi Jawa Timur, sedangkan sisanya sebanyak 20 kabupaten/ kota memiliki nilai IPM dibawah Provinsi Jawa Timur. Posisi peringkat Kabupaten Situbondo dibandingkan dengan tahun 2022 tidak mengalami perubahan, dimana pada tahun 2022 berada pada peringkat ke 30. Hal tersebut terjadi karena pertumbuhan IPM Kabupaten Situbondo tidak lebih tinggi dibandingkan dengan selisih angka dan pertumbuhan sebagian besar daerah lainnya. Untuk mengetahui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.17 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

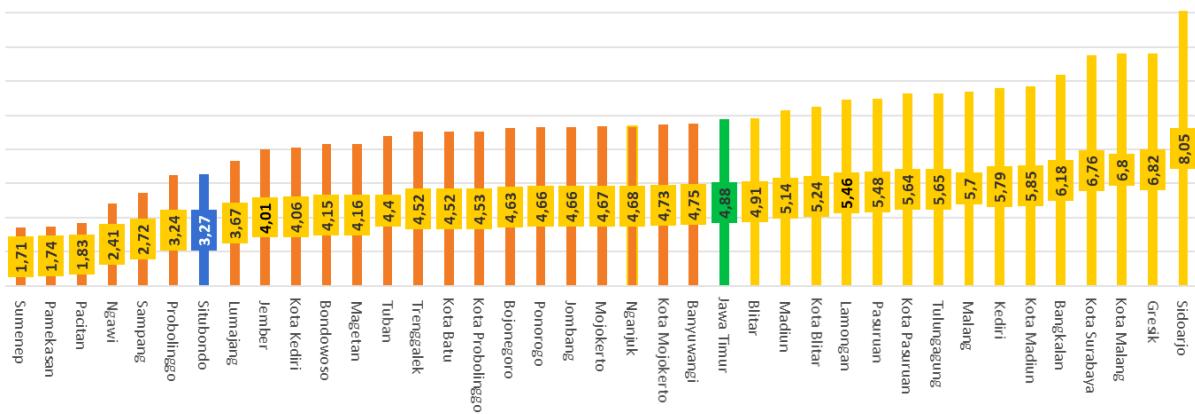
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

2.4 Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja menjadi salah satu aspek layanan non dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Di Situbondo, terdapat kurangnya ketertarikan anak-anak untuk melanjutkan bekerja. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan formal dan pelatihan kerja, serta kurangnya kesempatan kerja yang menarik bagi mereka di daerah. Dampaknya adalah rendahnya jumlah tenaga kerja yang tersedia di Situbondo, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Di sisi lain, terlihat tingginya minat anak-anak untuk bekerja sebagai konten kreator

dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh popularitas media sosial dan platform digital, yang memberikan peluang bagi anak-anak untuk mengekspresikan kreativitas mereka dan mendapatkan penghasilan dari konten yang mereka buat. Konten kreator telah menjadi salah satu profesi yang diminati oleh generasi muda saat ini, karena fleksibilitas dan potensi penghasilan yang tinggi. Namun, kita juga perlu menyadari adanya tingkat pengangguran terbuka di Situbondo.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk bekerja sama dalam menciptakan peluang kerja yang lebih baik dan menarik bagi anak-anak di Kabupaten Situbondo. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan formal dan pelatihan kerja, pengembangan sektor ekonomi yang berpotensi, dan dukungan untuk pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja saat ini. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi kurangnya ketertarikan anak-anak untuk bekerja di Situbondo dan mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi. Berikut ini merupakan grafik persentase TPT masing-masing Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur:



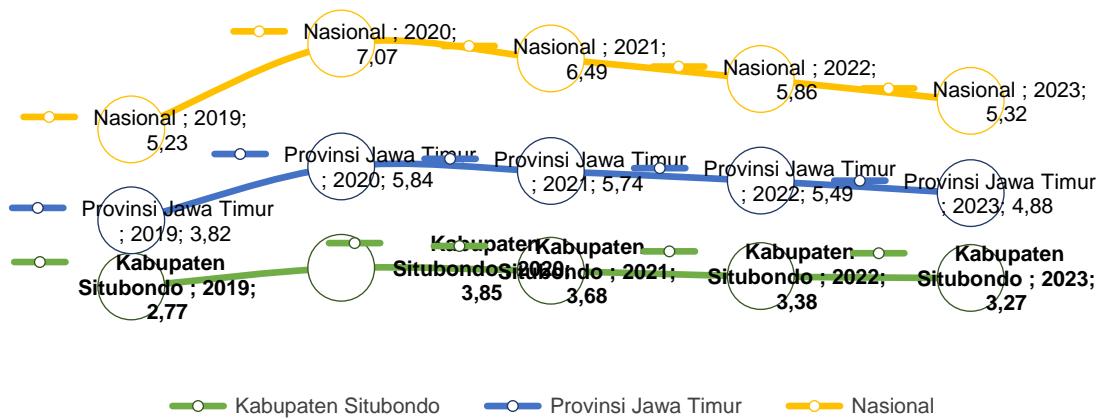
Gambar 2.18 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

Berdasarkan data yang terlihat pada grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Situbondo memiliki tingkat pengangguran terbuka yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Provinsi. Pada tahun 2023, persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Situbondo adalah sebesar 3,27%, sementara rata-rata persentase tingkat pengangguran terbuka di Provinsi mencapai 4,88%. Sedangkan untuk Kabupaten/ Kota yang memiliki Persentase TPT dengan angka tertinggi di Tahun 2023 yakni Kabupaten Sidoarjo sebesar 8,05%.

Namun, meskipun Kabupaten Situbondo memiliki tingkat pengangguran terbuka yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata

provinsi, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan serta pelatihan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya dalam memperkuat kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan program-program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Situbondo dapat terus mengoptimalkan potensi ekonominya dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka secara berkelanjutan.



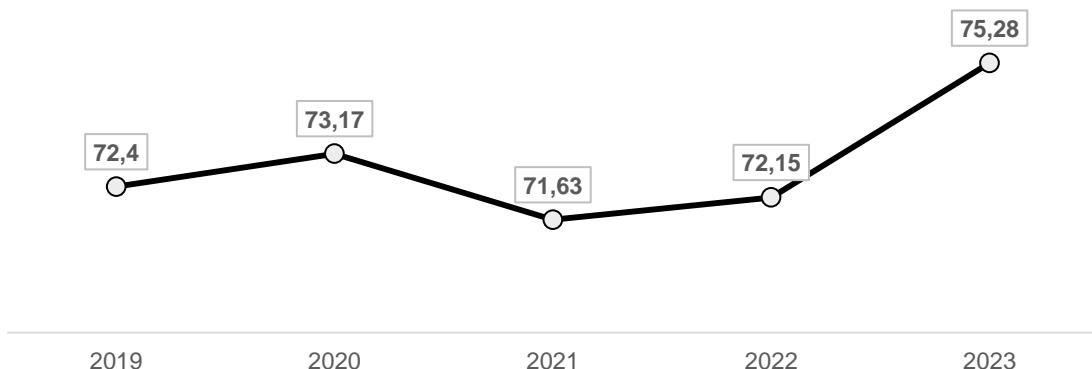
Gambar 2.19 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019 - 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Pusat, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur terus mengalami penurunan secara konsisten. Bahkan, saat ini angka TPT Jawa Timur lebih rendah daripada TPT nasional. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 6 November 2023 menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2023, TPT Jawa Timur mencapai angka 4,88 persen atau sekitar 1,17 juta jiwa. Angka ini lebih rendah 0,61 persen poin dibandingkan dengan TPT pada bulan Agustus 2022, yang mencapai 5,49 persen atau sekitar 1,26 juta jiwa. Penurunan TPT di Jawa Timur juga terjadi dengan tingkat yang tinggi, mengingat sebelumnya hanya terjadi penurunan sebesar 0,25 persen poin dalam periode Agustus 2021 hingga Agustus 2022. Namun, dalam periode Agustus 2022 hingga Agustus 2023, terjadi penurunan sebesar 0,61 persen poin. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang signifikan dalam mengatasi masalah pengangguran di Jawa Timur. Pada tahun 2023, TPT di Kabupaten Situbondo juga mengalami penurunan sebesar 0,11 persen menjadi 3,27. Penurunan ini menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia di Kabupaten Situbondo mampu memenuhi permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi

penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Situbondo.

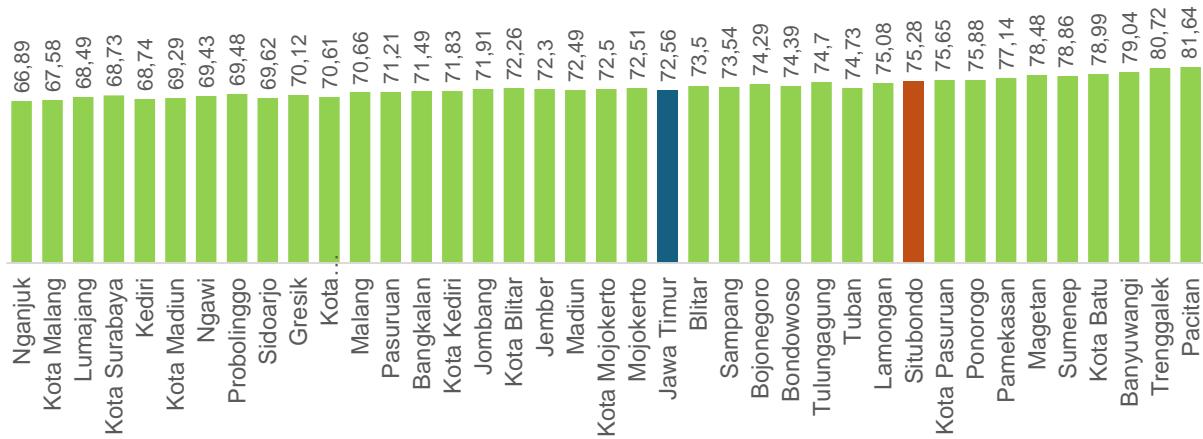
Selain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), salah satu indikator yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator penting yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK memberikan gambaran mengenai tingkat keterlibatan penduduk dalam aktivitas ekonomi dalam dinamika pasar tenaga kerja di suatu daerah. Apabila melihat perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Situbondo pada 5 tahun terakhir (2019 - 2023) menunjukkan tren yang fluktuatif namun memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021 nilai TPAK Kabupaten Situbondo memiliki capaian terendah yaitu sebesar 71,63. Namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan cukup signifikan hingga menyentuh angka 75,28. Berikut ini disajikan data secara lebih jelas untuk mengetahui perkembangan TPAK Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 - 2023.



Gambar 2.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Situbondo
Tahun 2019 - 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2024

Berdasarkan posisi relatif Kabupaten Situbondo dengan daerah lainnya serta dengan Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo berada di atas Provinsi Jawa Timur dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 75,28 pada tahun 2023 sedangkan Provinsi Jawa Timur memiliki angka capaian sebesar 72,56. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Situbondo lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi. Berikut ini untuk lebih jelas berkaitan dengan posisi relatif Kabupaten Situbondo apabila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur.



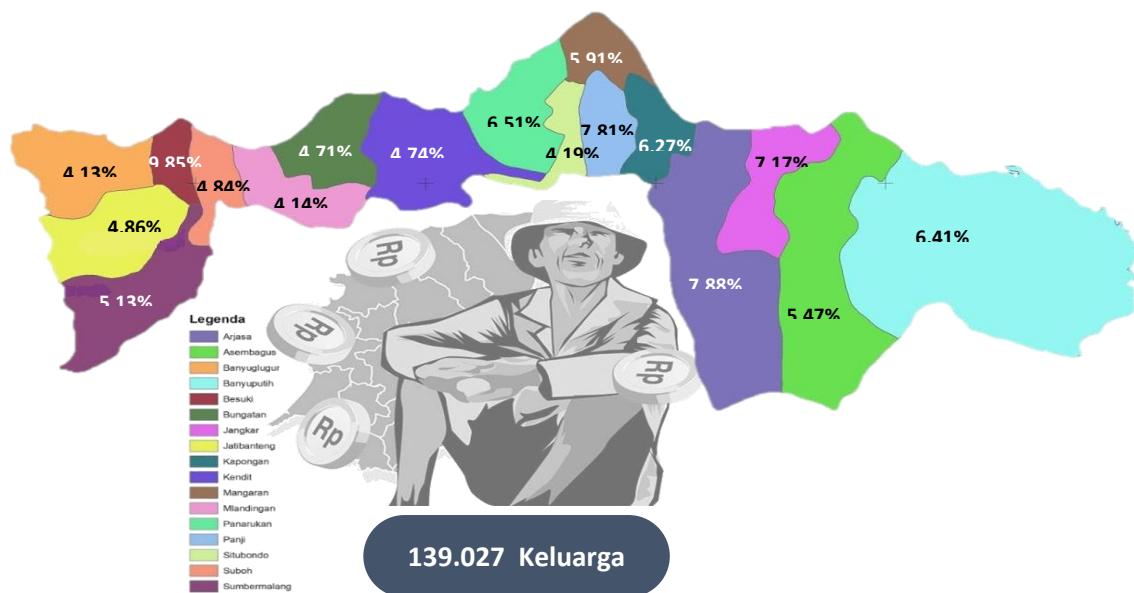
Gambar 2.21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

2.5 Profil Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Situbondo

Penduduk miskin ekstrem merupakan bagian dari penduduk miskin, karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp. 10.739/ orang/ hari atau Rp. 322.170/ orang/ bulan. Dengan kata lain, penduduk miskin ekstrem mempunyai pengeluaran lebih rendah dari penduduk miskin umum. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, setara dengan USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). PPP ditentukan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Atau dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/ orang/ hari atau Rp. 322.170/ orang/ bulan (BPS, 2021). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan (BPS, 2021). Program penghapusan kemiskinan ekstrem

memerlukan data terkini dan memiliki pemeringkatan status/ tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk dilengkapi nama dan alamat. Selanjutnya, data tersebut menjadi rujukan sasaran intervensi seluruh program. Selama belum tersedianya data yang termutakhirkan dan memiliki pemeringkatan status/ tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk, maka dapat menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupakan data yang diperoleh dari Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia). Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang telah diperoleh dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Situbondo tercatat sebanyak 139.027 keluarga yang tersebar pada 17 kecamatan.



Gambar 2.22 Persebaran Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo
Berdasarkan Kecamatan

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Diantara 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo, sebagian besar keluarga miskin ekstrem terdapat di Kecamatan Besuki yang mencapai 13.690 keluarga atau sebesar 9,85%. Selain di Kecamatan Besuki, sebagian besar keluarga juga terdapat di Kecamatan Arjasa yang tercatat sebanyak 10.960 keluarga atau sebesar 7,88%, Kecamatan Panji sebanyak 10.853 keluarga atau sebesar 7,81% dan Kecamatan Jangkar sebanyak 9.973 keluarga atau sebesar 7,17%. Sedangkan untuk kecamatan lainnya rata-rata memiliki proporsi berada dibawah 7%, persebaran terendah terdapat di Kecamatan Banyuglugur sebesar 4,13% atau sebanyak 5.738 keluarga. Untuk

mengetahui secara lebih jelas terkait dengan persebaran keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Situbondo secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Persebaran Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Proporsi (%)
1	Arjasa	10.960	7,88%
2	Asembagus	7.600	5,47%
3	Banyuglugur	5.738	4,13%
4	Banyuputih	8.915	6,41%
5	Besuki	13.690	9,85%
6	Bungatan	6.547	4,71%
7	Jangkar	9.973	7,17%
8	Jatibanteng	6.760	4,86%
9	Kapongan	8.714	6,27%
10	Kendit	6.588	4,74%
11	Mangaran	8.215	5,91%
12	Mlandingan	5.751	4,14%
13	Panarukan	9.044	6,51%
14	Panji	10.853	7,81%
15	Situbondo	5.824	4,19%
16	Suboh	6.722	4,84%
17	Sumbermalang	7.133	5,13%
Total		139.027	100,00%

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo bila diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin kepala keluarganya dapat diketahui bahwa sebagian besar kepala keluarga penduduk miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo berjenis kelamin laki-laki, dimana berdasarkan data tercatat sebanyak 105.215 jiwa atau sebesar 75,68%, sedangkan sisanya sebanyak 33.812 jiwa atau sebesar 24,32% memiliki jenis kelamin perempuan. Banyaknya kepala keluarga penduduk miskin (ekstrem) dengan jenis kelamin laki-laki di Kabupaten Situbondo menggambarkan bahwa adanya keterbatasan kepala keluarga dalam memperoleh pendapatan yang layak, dimana sebagian besar bekerja pada sektor informal. Sedangkan keberadaan kepala keluarga perempuan menggambarkan bahwa masih banyaknya

penduduk perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, sehingga dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki dan dengan beban hidup yang semakin meningkat menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang dialami oleh keluarga tersebut.

Keberadaan keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo tersebar hampir merata di setiap kecamatan, dimana dari 17 kecamatan persebarannya rata-rata setiap kecamatan mencapai 4,00% - 10,00%. Kecamatan Besuki tercatat menjadi kecamatan di Kabupaten Situbondo yang paling banyak terdapat keluarga miskin (ekstrem) dibandingkan dengan wilayah lainnya, dimana dari sebanyak 13.690 keluarga, jumlah kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki mencapai 10.846 jiwa dan memiliki proporsi sebesar 79,23% dari keseluruhan jumlah keluarga yang terdapat di wilayah tersebut. Sedangkan sisanya sebanyak 2.844 jiwa atau dengan proporsi sebanyak 20,77% memiliki jenis kelamin perempuan. Berbeda dengan Kecamatan Besuki, Kecamatan Banyuglugur tercatat menjadi wilayah di Kabupaten Situbondo yang paling sedikit terdapat keluarga miskin (ekstrem), dimana dari sebanyak 5.738 keluarga, jumlah kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki mencapai 4.375 jiwa dan memiliki proporsi sebesar 76,25% dari keseluruhan jumlah keluarga yang terdapat di wilayah tersebut. Sedangkan sisanya sebanyak 1.363 jiwa atau sebesar 23,75% memiliki jenis kelamin perempuan. Bila melihat persebaran kepala keluarga dengan jenis kelamin laki-laki di setiap kecamatan dapat diketahui bahwa sebagian besar terdapat di Kecamatan Besuki dengan proporsi sebanyak 10,31% dari keseluruhan jumlah kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Situbondo yang tercatat sebanyak 105.215 jiwa. Sedangkan persebaran kepala keluarga dengan jenis kelamin perempuan sebagian besar terdapat di Kecamatan Panji sebanyak 3.226 jiwa atau memiliki proporsi sebesar 9,54% dari keseluruhan jumlah kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan di Kabupaten Situbondo sebanyak 33.812 jiwa. Untuk mengetahui persebaran jumlah kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo berdasarkan jenis kelamin secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

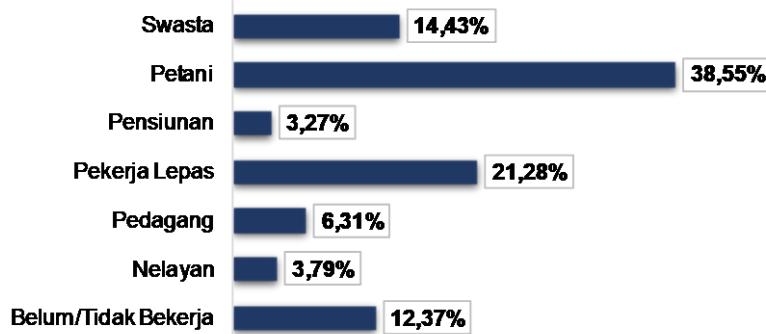
Tabel 2.2 Persebaran Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo
Berdasarkan Jenis Kelamin Kepala Keluarga dan Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Kelamin Kepala Keluarga				Jumlah Keluarga	
		Laki - laki		Perempuan			
		Jumlah KK	%	Jumlah KK	%		

No	Kecamatan	Jenis Kelamin Kepala Keluarga				Jumlah Keluarga	
		Laki - laki		Perempuan			
		Jumlah KK	%	Jumlah KK	%		
1	Arjasa	8.644	78,87%	2.316	21,13%	10.960	
2	Asembagus	5.463	71,88%	2.137	28,12%	7.600	
3	Banyuglugur	4.375	76,25%	1.363	23,75%	5.738	
4	Banyuputih	7.061	79,20%	1.854	20,80%	8.915	
5	Besuki	10.846	79,23%	2.844	20,77%	13.690	
6	Bungatan	5.100	77,90%	1.447	22,10%	6.547	
7	Jangkar	7.735	77,56%	2.238	22,44%	9.973	
8	Jatibanteng	5.209	77,06%	1.551	22,94%	6.760	
9	Kapongan	6.486	74,43%	2.228	25,57%	8.714	
10	Kendit	4.968	75,41%	1.620	24,59%	6.588	
11	Mangaran	5.916	72,01%	2.299	27,99%	8.215	
12	Mlandingan	4.706	81,83%	1.045	18,17%	5.751	
13	Panarukan	6.493	71,79%	2.551	28,21%	9.044	
14	Panji	7.627	70,28%	3.226	29,72%	10.853	
15	Situbondo	4.048	69,51%	1.776	30,49%	5.824	
16	Suboh	5.090	75,72%	1.632	24,28%	6.722	
17	Sumbermalang	5.448	76,38%	1.685	23,62%	7.133	
Total		105.215	75,68%	33.812	24,32%	139.027	

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Kondisi kemiskinan ekstrem berdasarkan pekerjaan kepala keluarga menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap penduduk miskin (kepala keluarga) demi kelangsungan hidupnya atau untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup, dimana setiap kepala keluarga miskin melaksanakan pekerjaan salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, karena kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak bisa di tunda-tunda. Melihat pada bidang pekerjaan yang saat ini dilaksanakan oleh kepala keluarga miskin (ekstrem), maka dapat terlihat bahwa sebagian besar kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo, yaitu sebanyak 121.826 jiwa atau sebesar 87,63% telah bekerja, sedangkan penduduk yang tidak/ belum bekerja saat ini hanya sebanyak 17.201 jiwa atau sebesar 12,37%. Adapun jenis pekerjaan yang dimiliki oleh kepala keluarga, yaitu : pegawai swasta, petani, pensiunan, pekerja lepas, wiraswasta, pedagang, dan nelayan.



Gambar 2.23 Persentase Kepala Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Berdasarkan pada pekerjaan yang dimiliki oleh kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo sebagaimana yang terdapat pada gambar di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar kepala keluarga miskin (ekstrem) bekerja sebagai petani, yaitu sebesar 38,55% atau sebanyak 53.597 jiwa. Kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo yang bekerja sebagai pekerja lepas tercatat sebanyak 29.581 jiwa atau mencapai 21,28%, sedangkan yang bekerja sebagai pegawai swasta tercatat sebanyak 20.065 jiwa atau mencapai 14,43%. Disamping kedua jenis pekerjaan tersebut, masih terdapat sebanyak 8.776 jiwa atau sebesar 6,31% kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo yang bekerja sebagai pedagang, sebanyak 5.264 jiwa atau sebesar 3,79% bekerja sebagai pedagang, serta sebanyak 4.543 jiwa atau sebesar 3,27% bekerja sebagai pensiunan. Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai jumlah kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Jumlah Kepala Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Kepala Keluarga
1	Belum/ Tidak Bekerja	17.201

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Kepala Keluarga
2	Nelayan	5.264
3	Pedagang	8.776
4	Pekerja Lepas	29.581
5	Pensiunan	4.543
6	Petani	53.597
7	Swasta	20.065
Jumlah		139.027

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Jenis pekerjaan kepala keluarga miskin (ekstrem) bila ditinjau berdasarkan persebarannya, maka dapat diperoleh informasi bahwa keberadaan kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo yang tidak/ belum bekerja saat ini telah tersebar di setiap kecamatan, dimana jumlah kepala keluarga miskin (ekstrem) yang tidak/ belum bekerja terbanyak terdapat pada Kecamatan Panji dengan proporsi sebesar 11,92% atau sebanyak 2.050 jiwa, sedangkan paling sedikit terdapat pada Kecamatan Sumbermalang dengan proporsi sebesar 1,69% atau sebanyak 291 jiwa. Untuk jumlah kepala keluarga miskin (ekstrem) yang bekerja sebagai Petani terbanyak terdapat pada Kecamatan Arjasa dengan proporsi sebesar 11,78% atau sebanyak 6.314 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat pada Kecamatan Situbondo dengan proporsi sebesar 0,86% atau sebanyak 461 jiwa. Sedangkan untuk kepala keluarga miskin (ekstrem) yang bekerja sebagai pekerja lepas terbanyak terdapat pada Kecamatan Besuki dengan proporsi sebesar 14,86% atau sebanyak 4.396 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat pada Kecamatan Jatibanteng dengan proporsi sebesar 1,65% atau sebanyak 489 jiwa. Untuk mengetahui persebaran kepala keluarga miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo berdasarkan jenis pekerjaan pada masing-masing kecamatan secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Persebaran Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Pekerjaan

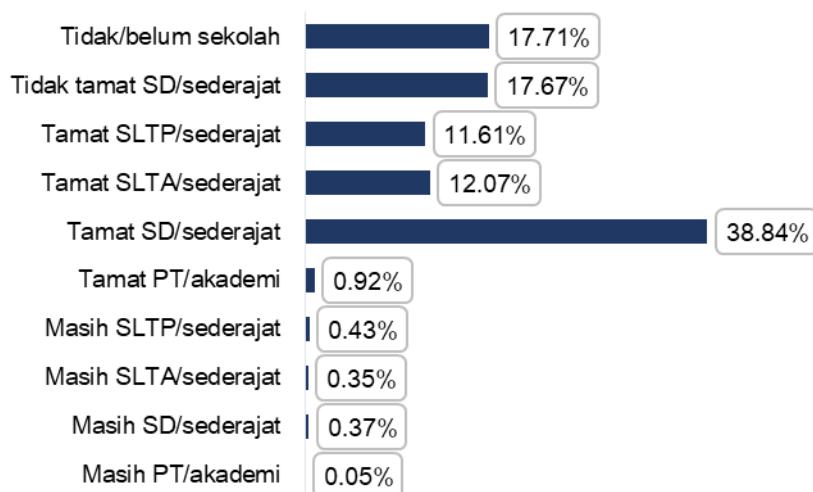
No	Kecamatan	Jenis Pekerjaan						
		Belum/ Tidak Bekerja	Nelayan	Pedagan g	Pekerja Lepas	Pensiuna n	Petani	Swasta
1	Arjasa	5,83%	0,72%	3,73%	8,02%	0,75%	11,78%	4,35%

No	Kecamatan	Jenis Pekerjaan						
		Belum/ Tidak Bekerja	Nelayan	Pedagan g	Pekerja Lepas	Pensiuna n	Petani	Swasta
2	Asembagus	7,31%	1,10%	6,14%	4,06%	12,90%	5,44%	5,19%
3	Banyuglugu r	4,12%	3,10%	2,77%	4,14%	2,44%	4,46%	4,48%
4	Banyuputih	6,03%	20,57%	6,52%	2,84%	7,37%	7,10%	6,18%
5	Besuki	9,85%	24,11%	14,65%	14,86%	12,66%	3,59%	12,69%
6	Bungatan	3,42%	4,01%	3,03%	3,29%	6,10%	6,22%	4,46%
7	Jangkar	6,37%	9,84%	6,34%	2,63%	4,71%	10,88%	4,89%
8	Jatibanteng	1,87%	0,27%	2,22%	1,65%	1,17%	9,91%	1,87%
9	Kapongan	6,56%	4,14%	7,63%	5,29%	5,61%	6,05%	8,15%
10	Kendit	4,90%	1,61%	3,11%	4,73%	6,78%	5,01%	4,94%
11	Mangaran	8,10%	14,19%	6,40%	6,29%	6,43%	4,44%	4,87%
12	Mlandingan	2,12%	0,63%	2,20%	6,53%	0,33%	4,87%	3,01%
13	Panarukan	8,51%	12,06%	10,40%	10,42%	8,01%	1,42%	9,10%
14	Panji	11,92%	0,63%	13,63%	8,66%	9,88%	3,55%	13,25%
15	Situbondo	6,98%	0,23%	5,29%	6,06%	8,74%	0,86%	7,46%
16	Suboh	4,42%	2,68%	4,10%	7,66%	3,96%	4,30%	3,54%
17	Sumbermala ng	1,69%	0,11%	1,83%	2,84%	2,16%	10,12%	1,56%
Total		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Tingkat pendidikan kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo sangat beragam, yaitu mulai tidak/ belum sekolah hingga tamat perguruan tinggi. Sebagian besar kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo memiliki tingkat pendidikan yang hanya tamat SD/ sederajat, yaitu tercatat sebanyak 53.997 jiwa atau sebesar 38,84%. Selain itu sebanyak 24.623 jiwa atau sebesar 17,71% tidak/ belum sekolah, dan sebanyak 24.561 jiwa atau sebesar 17,67% Tidak tamat SD/ sederajat. Kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo yang tamat Perguruan Tinggi hanya sebanyak 1.277 atau sebesar 0,92%, sedangkan masih menempuh pendidikan Perguruan Tinggi/ akademik sebanyak 63 jiwa atau sebesar 0,05%. Dengan banyaknya kepala keluarga miskin (ekstrem) yang hanya tamat SD/ sederajat menunjukkan bahwa faktor pendidikan formal turut menjadi kendala bagi penduduk untuk memperoleh kesejahteraan yang

lebih baik, sehingga dengan demikian pendidikan dan pengetahuan menjadi faktor penting yang perlu diperbaiki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meminimalkan keterbatasan kepala keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas perekonomian keluarganya. Untuk mengetahui persentase kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.24 Persentase Kepala Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Tabel 2.5 Jumlah Kepala Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Kepala Keluarga
1	Masih PT/akademi	63
2	Masih SD/sederajat	514
3	Masih SLTA/sederajat	482
4	Masih SLTP/sederajat	592
5	Tamat PT/akademi	1.277
6	Tamat SD/sederajat	53.997
7	Tamat SLTA/sederajat	16.774
8	Tamat SLTP/sederajat	16.144
9	Tidak tamat SD/sederajat	24.561
10	Tidak/belum sekolah	24.623
Jumlah		139.027

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Melihat pada persebaran kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo berdasarkan tingkat pendidikan selanjutnya dapat diketahui bahwa kepala keluarga yang memiliki tingkat pendidikan hanya tamat SD/ sederajat paling banyak terdapat pada Kecamatan Besuki yang mencapai 10,02% atau sebanyak 5.412 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat pada Kecamatan Mlandingan yang hanya mencapai 3,30% atau sebanyak 1.784 jiwa. Untuk kepala keluarga miskin (ekstrem) yang telah tamat Perguruan Tinggi paling banyak terdapat pada Kecamatan Besuki yang mencapai 15,97% atau sebanyak 204 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat pada Kecamatan Sumbermalang yang hanya mencapai 2,51% atau sebanyak 32 jiwa. Sedangkan untuk kepala keluarga miskin (ekstrem) yang tidak/ belum sekolah paling banyak terdapat pada Kecamatan Arjasa yang mencapai 13,48% atau sebanyak 3.318 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat pada Kecamatan Situbondo yang hanya mencapai 2,63% atau sebanyak 648 jiwa. Untuk mengetahui persebaran kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo berdasarkan tingkat pendidikan secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Persebaran Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo
Berdasarkan Kecamatan dan Tingkat Pendidikan

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan									
		Masih PT/ akademi	Masih SD/ sederajat	Masih SLTA/ sederajat	Masih SLTP/ sederajat	Tamat PT/ akademi	Tamat SD/ sederajat	Tamat SLTA/ sederajat	Tamat SLTP/ sederajat	Tidak tamat SD/ sederajat	Tidak/ belum sekolah
1	Arjasa	4,76%	6,81%	3,32%	8,28%	3,92%	7,37%	3,33%	4,40%	9,13%	13,48%
2	Asembagus	6,35%	7,78%	6,43%	4,73%	5,17%	5,11%	4,81%	5,04%	6,90%	5,52%
3	Banyuglugur	3,17%	3,31%	4,56%	4,56%	3,60%	4,19%	4,46%	4,14%	4,17%	3,74%
4	Banyuputih	7,94%	7,59%	6,22%	6,93%	6,03%	7,87%	5,02%	7,18%	3,90%	6,14%
5	Besuki	20,63%	5,06%	11,62%	9,12%	15,97%	10,02%	15,86%	14,26%	4,10%	7,94%
6	Bungatan	4,76%	6,42%	6,43%	7,26%	4,62%	4,40%	4,88%	4,78%	4,98%	4,83%
7	Jangkar	4,76%	12,65%	4,77%	9,63%	4,39%	6,71%	4,07%	5,87%	8,84%	9,52%

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan									
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
8	Jatibanteng	4,76%	4,09	3,94	4,05	3,68	3,94	3,05	3,95	8,63	5,07%
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
9	Kapongan	7,94%	7,59	5,60	5,74	5,64	7,34	5,13	5,38	5,72	5,86%
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
10	Kendit	1,59%	3,50	3,53	3,89	3,76	5,41	3,84	4,04	4,26	4,95%
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
11	Mangaran	6,35%	5,45	5,81	6,42	4,39	6,79	4,38	4,49	4,77	7,15%
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
12	Mlandingan	1,59%	7,78	5,19	3,89	6,42	3,30	3,80	4,31	6,44	3,58%
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
13	Panarukan	6,35%	4,86	10,79	6,93	7,52	6,53	10,68	9,00	4,41	3,96%
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
14	Panji	4,76%	4,67	8,09	7,77	10,42	8,02	10,83	8,77	5,34	7,03%
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
15	Situbondo	3,17%	3,50	5,39	2,53	6,89	3,72	8,97	5,84	2,33	2,63%
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
16	Suboh	9,52%	3,70	4,36	5,57	5,09	5,05	4,80	5,69	4,40	4,24%
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
17	Sumbermalang	1,59%	5,25	3,94	2,70	2,51	4,22	2,12	2,86	11,68	4,37%
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Strategi & Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Visi RPJMD mengikuti visi Presiden dan wakil presiden periode 2025 – 2029 yaitu “Bermasa Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” arsitektur visi di topang oleh 3 pilar melalui 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat dan didukung 320 program kerja.

Visi RPJMN

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.



Pencapaian visi Presiden dilaksanakan melalui 8 Misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins), dan 320 program kerja.

Asta Cita merupakan misi dalam RPJMN periode 2025 – 2029, misi tentang kemiskinan tercermin membangun dari desa dan dari bawah pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi perhatian untuk ditanggulangi dan diberantas.

Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi **Prioritas Nasional** dalam RPJMN 2025-2029

“Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah 2025-2029”



Pemberantasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas presiden.

17 Program Prioritas Presiden

- | | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|
| 1 | Mencapai swasembada pangan, energi, dan air | • | 10 | Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas | • |
| 2 | Penyempurnaan sistem penerimaan negara | • | 11 | Menjamin pelestarian lingkungan hidup | • |
| 3 | Reformasi politik, hukum, dan birokrasi | • | 12 | Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani | • |
| 4 | Pencegahan dan pemberantasan korupsi | • | 13 | Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan | • |
| 5 | Pemberantasan kemiskinan | • | 14 | Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya | • |
| 6 | Pencegahan dan pemberantasan narkoba | • | 15 | Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi | • |
| 7 | Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat | • | 16 | Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah | • |
| 8 | Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi | • | 17 | Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga. | • |
| 9 | Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif | • | | | |

Sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2025 – 2029 ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025 – 2029. Agar kinerja pembangunan menjadi terukur di tetapkan target 2029 untuk setiap sasaran utama pembangunan, kemiskinan ditargetkan menjadi 4,5 – 5 dan kemiskinan ekstrem 0%

Sasaran Utama Pembangunan Nasional

01

- Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju**
- GNI Per kapita 7.400-8.240 USD
 - Kontribusi PDB Maritim 9,1 %
 - Kontribusi PDB Manufaktur 21,9%

Sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2025-2029 ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025-2029. Agar kinerja pembangunan menjadi terukur, ditetapkan target tahun 2029 untuk setiap sasaran utama pembangunan.

02

- Kemiskinan menurun & Ketimpangan berkurang**
- 4,5-5,0% (tingkat kemiskinan ekstrem 0%* di tahun kedua)
 - Rasio gini 0,372-0,375
 - Kontribusi PDRB KTI 23,3%

04

- Peningkatan daya saing sumber daya manusia**
- Indeks Modal Manusia (IMM) mencapai 0,59

03

- Kepemimpinan & pengaruh di dunia Internasional meningkat**
- Global Power Indeks berada di rangking 29

05

- Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission***
- Penurunan intensitas emisi GRK menjadi 62,37%
 - Indeks kualitas lingkungan hidup menjadi 77,20

Keterangan: *Cut off kemiskinan ekstrem: 2,15 GK

Strategi penurunan kemiskinan terdiri dari 4 dengan 1 sata data kemiskinan. 4 strategi terdiri dari pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dan inovatif melalui kartu usaha produktif dan afirmatif, perlindungan sosial yang integratif, adaptif, dan inklusif melalui kartu kesejahteraan, peningkatan akses pelayanan dasar, dan program kewilayahan, koneksi, dan kerja. Serta dengan satu data referensi

Strategi Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan SDM Berkualitas



3.2 Perencanaan dan Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo

A. Prioritas Target dan Intervensi Ketenagakerjaan

Pada Bab III telah di jelaskan analisis masalah kemiskinan di bidang ketenagakerjaan, terdapat dua indikator yaitu tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Salah satu prioritaskan dalam menurunkan kemiskinan dengan meningkatkan tenaga kerja sektor formal. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai tujuan menurunnya tingkat pengangguran terbuka adalah:

1. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja
2. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja bagi masyarakat miskin
3. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja bagi masyarakat miskin

Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya menurunnya tingkat pengangguran adalah dengan meningkatkan akses angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Adapun program yang disiapkan :

Sasaran	Prioritas Intervensi
Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Pemberian Kemudahan/ Insentif Penanaman Modal
	Penyediaan Peta Potensi Penanaman Modal
	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
	Penyelenggaraan Job Fair

Sasaran	Prioritas Intervensi
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja bagi masyarakat miskin	Penguatan Hubungan Industrial (Alokasi TK Lokal)
	Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Penumbuhan Wira Usaha Baru (Diversifikasi Keahlian)
	Fasilitasi Pengiriman Tenaga Migran
	Penguatan Unit Layanan Disabilitas
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja bagi masyarakat miskin	Penyelenggaraan DIKLAT bagi Pencari Kerja Berdasarkan Cluster Kompetensi (Pendidikan Vokasi)
	Pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah (FKLPID)
	Penyelenggaraan Magang Kerja
	Sertifikasi SDM Pariwisata
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja bagi masyarakat miskin	Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
	Pemantauan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Miskin

B. Prioritas Target dan Intervensi Pemberdayaan (Pertanian, Peternakan, dan Perikanan)

Pemberdayaan masyarakat berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat. Intervensi pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sehingga menciptakan ketahanan pangan, termasuk pendapatan dari petani, nelayan dan peternak. Semakin besar upaya pemerintah menciptakan pemberdayaan yang efektif dan berorientasi pada hasil penjualan yang meningkat maka masyarakat akan terbebas dari jerat kemiskinan. Tetapi pemberdayaan ini harus berfokus pada buruh tani dan petani yang mempunyai lahan terbatas. Upaya lain yang dilakukan berfokus pada stabilitas harga hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Stabilitas ini juga mempengaruhi konsumsi pangan masyarakat, semakin rendah harga maka masyarakat dapat mengakses pangan. Adapun sasaran yang ingin

dicapai dalam upaya mencapai tujuan Meningkatnya Penjualan Produksi Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan adalah:

1. Meningkatkan Kapasitas Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
2. Menurunkan Beban Biaya Usaha
3. Stabilitas Harga Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
4. Penyediaan Perlindungan bagi Petani, Peternak, dan Nelayan

Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas dan penjualan yang menghasilkan peningkatan pendapat. Adapun program yang disiapkan :

Sasaran	Prioritas Intervensi
Meningkatkan Kapasitas Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Fasilitasi Akses Pupuk Bersubsidi
	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani
	Pembangunan Jaringan Sumur Dangkal Dalam
	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
	Penyediaan Varietas Unggul Baru
	Penyelanggaraan Sekolah Lapang
	Pengembangan IP 400
	Pengendalian Hama dan Penyakit
	Intensifikasi Pertanian (Tumpang Sari)
	Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak yang Berkualitas
	Penggunaan Teknologi Peternakan untuk Perkawinan Ternak
	Pemberian Pendampingan Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu
	Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi Tenaga Kesehatan Hewan
	Pelaksanaan Pelatihan Budidaya Ikan yang Sesuai Standar
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan yang sesuai Standar
	Penyediaan Bibit dan Pakan Ikan yang Berkualitas
	Pemberian Pendampingan dan Sosialisasi

Sasaran	Prioritas Intervensi
	kepada Nelayan dalam Pemanfaatan Sarpras Perikanan Tangkap
	Penebaran Bibit Ikan (Restoking) di Perairan Umum Daratan (PUD)
Menurunkan Beban Biaya Usaha	Pemberian Bantuan Bibit Pemberian Bantuan ALSINTAN Pemberian Bantuan Pupuk Non Subsidi Fasilitasi Bantuan Pupuk Non Subsidi Pemberian Bantuan Bibit dan Pakan Ikan yang Berkualitas Fasilitasi Bantuan Pendanaan dan Bantuan Pembiayaan kepada Nelayan
Stabilitas Harga Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Pembangunan Lumbung Pangan Penggunaan Teknologi of Seasion (Pembuahan diluar Musim) untuk Hortikultura Pembangunan Gudang Pakan Ternak dan Sarprasnya Publikasi Informasi Harga Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Menyediakan Informasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok Peningkatan Sarpras di TPI
Penyediaan Perlindungan bagi Petani, Peternak, dan Nelayan	Pemberian Asuransi bagi Petani (Tembakau & Padi) Pemberian Asuransi bagi Peternak Sapi Pemberian Asuransi bagi Nelayan

C. Prioritas Target dan Intervensi Peningkatan UMKM

Salah satu strategi nasional untuk menanggulangi kemiskinan yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat ekonomi kelas bawah yaitu dengan meningkatkan penjualan produksi hasil usaha masyarakat miskin. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai tujuan Meningkatnya Penjualan Produksi Hasil Usaha Masyarakat Miskin (Usaha Mikro) adalah

1. Meningkatkan Skala Usaha Masyarakat Miskin

2. Peningkatan Wirausaha Baru Masyarakat Miskin

Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi . Adapun program yang disiapkan:

Sasaran	Prioritas Intervensi
Meningkatkan Skala Usaha Masyarakat Miskin	Pelatihan Pengolahan Produk Hasil Peternakan dan Perikanan
	Pemberian Bantuan Sarpras untuk Pengolahan Produk Peternakan dan Perikanan
	Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Usaha Pasca Produksi Perikanan & Peternakan
	Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi dan Pemasaran
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf
Peningkatan Wirausaha Baru Masyarakat Miskin	Diversifikasi Usaha Nelayan melalui Kegiatan dimasa Panceklik Ikan
	Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa)
	Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Ekonomi
	Pelatihan Peningkatan Keterampilan bagi Wirausaha Baru (WUB)
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Muda Pemula

D. Prioritas Target dan Intervensi bantuan Sosial

Bantuan Sosial merupakan strategi untuk mengurangi beban masyarakat miskin. Bantuan sosial (bansos) bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kerentanan ekonomi, dengan menyediakan dukungan finansial atau kebutuhan pokok. Bantuan sosial juga untuk meningkatkan kualitas hidup penerima dengan memberikan akses ke layanan sosial dan ekonomi. Dari hasil fgd yang dilakukan bahwa permasalahan besar ada pada data sosial yang tidak tepat sasaran. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai tujuan pemenuhan bantuan sosial yang tepat dan akurat adalah

1. Keakuratan data kemiskinan;

2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatkan bantuan sosial . Adapun program yang disiapkan:

Sasaran	Prioritas Intervensi
Keakuratan data kemiskinan	Monev data kependudukan dengan data kesejahteraan masyarakat
	Penyiapan data kependudukan
Tepenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Penyaluran Bantuan alat bantu
	Penyaluran bantuan Pangan
	Penyaluran Bantuan Sandang

E. Prioritas Target dan Intervensi Pendidikan dan Kesehatan

Pada Bab III telah di analisis masalah kemiskinan multidimensional, bahwa ada beberapa indikator yang menyebabkan faktor kemiskinan terutama pada stunting dan bantuan sosial terkait jaminan kesehatan. Stunting sumenep termasuk perlu di optimalkan serta jaminan kesehatan. Pendidikan juga menjadi bagian penting untuk perlu dirubah. Pendidikan berfokus untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan menurunkan angka putus sekolah. Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1. Menurunnya angka putus sekolah
2. Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidikan non formal
3. Menurunnya angka stunting
4. Meningkatnya jaminan kesehatan masyarakat

Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatkan tingkat pendidikan dan kesehatan . Adapun program yang disiapkan:

Sasaran	Prioritas Intervensi
Menurunnya angka putus sekolah	Bantuan beasiswa terancam putus sekolah
	beasiswa perguruan tinggi untuk Rumah Tinggi Miskin
	Pembentukan Tim ATS daerah
	Fasilitasi anak tidak sekolah melalui PKBM
Meningkatnya	insetif guru ngaji

Sasaran	Prioritas Intervensi
kesejahteraan tenaga pendidikan non formal	Insentif guru PAUD
Menurunnya angka stunting	pemberian makanan tambahan pemulihan
	pemberian makanan tambahan stimulan
Meningkatnya jaminan kesehatan masyarakat	Pembayaran iuaran masyarakat miskin

F. Prioritas Target dan Intervensi Kebencanaan

Bencana alam dapat secara signifikan menyebabkan atau memperparah kemiskinan karena dampak destruktif yang ditimbulkannya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan. Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya rehabilitasi kerusakan rumah akibat bencana
2. Pemenuhan air pada kawasan kekeringan
3. Meningkatnya bantuan korban Bencana

Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatnya pemulihan pasca bencana. Adapun program yang disiapkan:

Sasaran	Prioritas Intervensi
Meningkatnya rehabilitasi kerusakan rumah akibat bencana	Penghitungan Penilaian Kerusakan
	Perbaikan Rumah tidak layak huni
Pemenuhan air pada kawasan kekeringan	Pengiriman Air Bersih
Meningkatnya bantuan korban Bencana	Bantuan Sembako
	Penyaluran bantuan sosial untuk korban bencana

G. Prioritas Target dan Intervensi Infrastruktur Dasar (Air Bersih, Sanitasi dan Rumah Layak Huni)

Infrastruktur yang memadai membuka peluang ekonomi bagi masyarakat miskin dengan memudahkan akses air bersih, sanitasi dan rumah layak huni. Peningkatan infrastruktur menurunkan biaya hidup. Selain itu, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak dapat meningkatkan kesehatan

masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya kualitas akses air minum layak di perdesaan
2. Meningkatnya kualitas sanitasi layak bagi masyarakat miskin
3. Menurunnya kawasan kumuh dan meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni

Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatnya pemulihan pasca bencana. Adapun program yang disiapkan:

Sasaran	Prioritas Intervensi
Meningkatnya kualitas akses air minum layak di perdesaan	Pembangunan Infrastruktur SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di Wilayah Perdesaan Pemeliharaan infrastruktur SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di wilayah perdesaan pembinaan dan pengawasan pengelola SPAM
Meningkatnya kualitas sanitasi layak masyarakat miskin	Pembangunan Jamban Keluarga Masyarakat Miskin Pembinaan pengelolaan Jamban Keluarga
Menurunnya Kawasan Kumuh dan Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Rumah Layak Huni	Peningkatan PSU di Kawasan Kumuh Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

H. Prioritas Target dan Intervensi Konektivitas

Peningkatan infrastruktur juga mengurangi biaya transportasi dan distribusi, sehingga menurunkan biaya hidup. Meningkatkan konektivitas, baik fisik maupun digital, berperan krusial dalam menurunkan kemiskinan dengan memperluas akses masyarakat ke peluang ekonomi dan sosial. Konektivitas fisik melalui pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik memungkinkan distribusi barang dan jasa yang lebih efisien, membuka pasar baru bagi produsen lokal, dan memudahkan mobilitas tenaga kerja.

engan meningkatnya keterhubungan, masyarakat miskin dapat lebih mudah mengakses sumber daya, informasi, dan jaringan yang dapat mengangkat kondisi ekonomi mereka secara signifikan.

Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah

1. Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan daerah terisolir
2. Meningkatnya Sarana Konektivitas Kewilayahannya

Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatnya konektivitas. Adapun program yang disiapkan:

Sasaran	Prioritas Intervensi
Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan daerah terisolir	Pembangunan Jalan dan Jembatan di daerah terisolir
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di daerah terisolir
Meningkatnya Sarana Konektivitas Kewilayahannya	Penyaluran Bantuan Moda Transportasi ke Wilayah Terisolir
	Pemasangan PJU dan Sarana dan Perlengkapan Jalan

I. Prioritas Target dan Intervensi Kemandirian Desa

Kemandirian desa merupakan strategi penting dalam menurunkan kemiskinan dengan mengoptimalkan potensi lokal dan memberdayakan masyarakat setempat. Melalui pengelolaan sumber daya alam, pertanian, dan usaha mikro yang berbasis kearifan lokal, desa dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakatnya.

Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah

Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatnya konektivitas. Adapun program yang disiapkan:

Sasaran	Prioritas Intervensi
Meningkatnya Pengelolaan BUMDes	Pelatihan Penguatan Kelembagaan & Tata Kelola BUMDes
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BUMDes

J. Prioritas Target dan Intervensi Ketahanan Keluarga

Meningkatkan ketahanan keluarga adalah kunci untuk menurunkan kemiskinan karena keluarga yang tangguh secara ekonomi dan sosial mampu mengatasi tantangan finansial dan krisis yang mungkin muncul. Peningkatan ketahanan keluarga dapat mencegah terjadinya siklus kemiskinan antar-generasi dengan memastikan anak-anak mendapat asupan gizi yang cukup, pendidikan yang layak, dan lingkungan yang aman, yang pada akhirnya memperbesar peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan.

Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah

1. Menurunan angka pernikahan dini
2. Meningkatnya cakupan keluarga berencana

Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatnya konektivitas. Adapun program yang disiapkan:

Sasaran	Prioritas Intervensi
Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan daerah terisolir	Pembangunan Jalan dan Jembatan di daerah terisolir
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di daerah terisolir
Meningkatnya Sarana Konektivitas Kewilayah	Penyaluran Bantuan Moda Transportasi ke Wilayah Terisolir
	Pemasangan PJU dan Sarana dan Perlengkapan Jalan

BAB IV

RENCANA AKSI TAHUN 2025

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit / Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DPMPTSP															
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen terbit Kebijakan Kemudahan/Ise ntif Penanaman Modal	1 Dokumen	Jumlah rapat koordinasi / persiapan kebijakan pemberian insentif penanaman modal	1	Kali	1				86.130.282		Kabupaten Situbondo	DPMPTSP	Kelompok JF Penanaman Modal
				Jumlah FGD	1	Kali	1						Kabupaten Situbondo		
				Jumlah Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)	1	Kali		1					Kabupaten Situbondo		
				Jumlah Pelaksanaan Study Banding Raperda Insentif	1	Kali		1					Kabupaten Situbondo		
				Jumlah Raperda Kebijakan Kemudahan/Isentif Penanaman Modal	1	Dokumen		1					Kabupaten Situbondo		

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota	1 Wilayah		4	Jumlah rapat koordinasi peta potensi investasi daerah yang dilaksanakan	1	1	2		49.444.250		Kecamatan Mangaran dan Panarukan	DPMPT SP	Kelompok JF Penanaman Modal 1
					1	Jumlah laporan analisa Peta Potensi yang disusun				1			Kecamatan Mangaran dan Panarukan		
					1	Jumlah konsep dokumen peta potensi investasi dan peluang usaha yang disusun				1			Kecamatan Mangaran dan Panarukan		
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	- 1 kali Pameran - 1 Media Radio		4	Jumlah rapat promosi yang dilaksanakan	2	2			99.055.000		Kabupaten Situbondo	DPMPT SP	Kelompok JF Penanaman Modal 1
					7	Jumlah Penanyangan Promosi pada Media Radio	2	2	1				Kabupaten Situbondo		
					4	Jumlah Jenis Media Promosi yang digunakan		4					Kabupaten Situbondo		
					1	Jumlah Pameran Investasi yang diikuti		1					-		

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
					3	Jumlah konten promosi investasi yang dilaksanakan secara berkala	1	1		1			Kabupaten Situbondo		
					5	Jumlah rapat koordinasi terkait I-PPRO	1	1	2	1			-		
BPBD															
Meringankan beban pengeluaran	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASN A) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	4 Dokumen	Membentuk tim kerja kemudian diikuti dengan penghitungan kerugian dan penilaian kerusakan akibat dampak bencana	Dokumen	Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana	√	√	√	√	46.476.565	DAU	Wilayah Terdampak Bencana	BPBD	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
Meringankan beban pengeluaran	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota	Persentase Korban terdampak kekeringan yang mendapatkan bantuan air bersih	100 Persen	Melaksanakan distribusi air bersih dalam rangka upaya pertolongan kepada korban bencana kekeringan	Percent	Korban terdampak bencana yang mendapatkan layanan pertolongan berupa pemenuhan kebutuhan dasar air bersih	√	√	√	√	80.000.000	DAU	Wilayah Terdampak Bencana	BPBD	Bidang Kedauratan dan Logistik
Meringankan beban pengeluaran	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten /Kota	Persentase Korban terdampak kekeringan yang mendapatkan bantuan air bersih	100 Persen	Memfasilitasi koordinasi pengamanan tanggap darurat bencana serta menyediakan kebutuhan air bersih jika terjadi bencana kekeringan	Percent	Korban terdampak bencana yang mendapatkan layanan pertolongan berupa pemenuhan kebutuhan dasar air bersih	√	√	√	√	20.000.000	DAU	Wilayah Terdampak Bencana	BPBD	Bidang Kedauratan dan Logistik
Meringankan beban pengeluaran	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Persen	Menyediakan kebutuhan serta distribusi logistik korban bencana	Percent	Korban terdampak bencana yang mendapatkan bantuan logistik	√	√	√	√	63.286.800	DAU	Wilayah Terdampak Bencana	BPBD	Bidang Kedauratan dan Logistik

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah															
Mengurangi Beban Pengeluaran	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/R PJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	Terlaksananya Pemutakhiran Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2025 (dengan sumber data P3KE dan kondisi riil di lapangan)	Laporan	Penetapan Pemutakhiran Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk yang terlaksana		1		1	175.730.000	DAU	Kab. Situbondo (Seluruh Kecamatan)	Bapperida	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Mengurangi Beban Pengeluaran	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/R PJMD pada Bidang Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	Meningkatnya Optimalisasi Koordinasi Sekretariat TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kabupaten Situbondo	Laporan	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan yang tersusun		1		1	244.200.786	DAU	Kab. Situbondo (Seluruh Kecamatan)	Bapperida	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5 Kelompok	Pemberian Hibah Bantuan Ternak dan Bimtek kepada Kelompok Ternak	Kelompok	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	0	1	2	2	231.702.050	DAU Jasmas /Musrenbang	1. Kelompok Peternak Kambing Sejahtera Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih 2. Kelompok Ternak Ayam Kampung Pelopor Desa Bantal Kecamatan Asembagus 3. Kelompok Ternak Kambing Merdeka Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih 4. Kelompok Ternak Kambing Perjuangan Desa Arjasa Kecamatan Arjasa 5. Kelompok Ternak Kambing Sentosa Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih	Dinas Peternakan dan Perikanan	Bidang Sarana Prasarana, Sarana, Perbibitan, Produksi dan Penyuluhan Peter nakan

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.0 2.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	1 Kelompok	Pemberian Bantuan Hibah Bibit Ikan dan Pelatihan Budidaya Ikan	Kelompok	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	0	1	0	0	200.000.000	DAU Jasma /Musrenbang	POKDAKAN TATA MINA SAMUDRA (Desa Klatakan Kecamatan Kendit)	Dinas Peternakan dan Perikanan	Bidang Perikanan Budidaya
	3.25.04.2.0 4.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	Pemberian Bantuan Hibah Bibit dan Pakan Ikan (Udang Vannamei) serta Sarana Prasarana	Unit	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	1	0	0	200.000.000	DAU Jasma /Musrenbang	Pokdakan Cahaya Purnama (Desa Ketah Kecamatan Suboh)	Dinas Peternakan dan Perikanan	Bidang Perikanan Budidaya

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.0 1.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	6 Kelompok	Pemberian bantuan hibah sarana prasarana perikanan tangkap beserta pelatihan dan sosialisasi kepada nelayan kecil	Kelompok	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0	2	2	2	575.000.000	DAU Jasmas	1. Desa Demung Kecamatan Besuki 2. Desa Ketah Kecamatan Suboh 3. Desa Kilensari Kecamatan Panarukan 4. Desa Landangan Kecamatan Kapongan 5. Desa Jangkar Kecamatan Jangkar 6. Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih	Dinas Peternakan dan Perikanan	Bidang Perikanan Tangkap
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan															
Fasilitasi Akses Pupuk Bersubsidi	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pertani yang mendapatkan aturan pupuk subsidi	75207 Petani	Memverval petani yang memanfaatkan pupuk subsidi	Petani	Petani yang mendapatkan manfaat pupuk subsidi	752 07 Petani	752 07 Petani	752 07 Petani	125.000.000	DAU	Kab. Situbondo	Disperangan	Penyuluhan	
Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	12 Unit	Membanun Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	Terbangunnya Jaringan Irigasi Usaha Tani		12 Unit		2.150.030.000	DAU/D BHCHT	Kab. Situbondo	Disperangan	Tanaman Pang'an	

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
Pembangunan Jaringan Sumur Dangkal Dalam	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya & Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Jaringan Sumur Dangkal Dalam yang dibangun	15 Unit	Membangun sumur dangkal dan sumur dalam	Unit	Terbangunnya sumur dangkal dan sumur dalam	11 Unit				2.150.000.000	DBHCH T	Kab. Situbondo	Dispersiangan	
Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani (JUT) yang dibangun	4 Unit	Membanun Jalan Usaha Tani	Unit	Terbangunnya Jalan Usaha tani	14 Unit				2.650.000.000	DBHCH T	Kab. Situbondo	Dispersiangan	Tanaman Pang'an, Hortikultura dan Perkebunan
Penyediaan Varietas Unggul Baru	Perbanyak an Benih Bersertifikasi Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah Benih Varietas Unggul Baru yang disediakan	125 Ton	Menyediakan bibit unggul	Ton	Tersedianya bibit unggul	25 Ton	25 Ton	25 Ton		1.250.000.000	DAU	Kab. Situbondo	Dispersiangan	Tanaman Pang'an

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
Penyelenggaraan Sekolah Lapang	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Sekolah Lapang yang diselenggarakan	5 Unit	Melaksanakan Sekolah Lapang pembuatan pupuk organik	Unit	Terlaksananya Sekolah Lapang Pupuk Organik	5 Unit				557.908.000	DBHCH T	Kab. Situbondo	Dispersiangan	Penyuluhan
Pengembangan IP 400	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Luasan yang mengembangkan IP 400	5 Hektar	Melaksanakan pengembangan padi Organik	Hektar	Terlaksananya pengembangan padi organik	3 Hektar			2 Hektar	100.000.000	DAU	Kab. Situbondo	Dispersiangan	Tanaman Pang an
Pengendalian Hama dan Penyakit	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan yang dikendalikan		Melaksanakan gerakan pengendalian dan preventif	Hektar	Terlaksananya gerakan pengendalian dan preventif	10 Hektar	10 Hektar	10 Hektar	20 Hektar	210.287.500	DAU	Kab. Situbondo	Dispersiangan	Tanaman Pang an
Intensifikasi Pertanian (Tumpang Sari)	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi	Jumlah Luasan yang menerapkan intensifikasi	27 Hektar	Melaksanakan intensifikasi pertanian	Hektar	Terlaksananya intensifikasi pertanian			27 Hektar		450.000.000	DBHCH T	Kab. Situbondo	Dispersiangan	Tanaman Pang an dan Hortikultura

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
	dan Spesifik Lokasi														
Pemberian Bantuan Bibit	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Bibit yang disediakan		Melaksanakan pengembangan kawasan hortikultura	pohon	Terlaksananya pengembangan kawasan hortikultura			4100 Pohon		350.000.000	DBHCHT	Kab. Situbondo	Dispersiangan	Tanaman Pang'an dan Hortikultura
Pemberian Bantuan Alsintan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Alsintan yang disediakan		Menyediakan alsintan	Unit	Tersedianya alsintan			153 Unit		1.300.000.000	DAU/D BHCHT	Kab. Situbondo	Dispersiangan	Tanaman Pang'an, Hortikultura dan Perkebunan
Pemberian Bantuan Pupuk Non Subsidi	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	Jumlah Petani yang mendapatkan Pupuk	75207 Petani	Memverval petani yang memanfaatkan pupuk subsidi	Petani	Petani yang mendapatkan manfaat pupuk subsidi	75207 Petani	75207 Petani	75207 Petani	75207 Petani	125.000.000	DAU	Kab. Situbondo	Dispersiangan	Penyuluhan

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
	Penyuluhan Pertanian	Bersubsidi													
Penggunaan Teknologi of Seasion (Pembuahan diluar musim) untuk Hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Luasan yang menerapkan teknologi of seasion	10 Hektar	Melaksanakan GAP	Hektar	Terlaksananya GAP			10 Hektar		-	DAU	Kab. Situbondo	Dispersiangan	Tanaman Pang'an, Hortikultura dan Perkebunan
DP3AP2KB															
Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan pelatihan ketramplilan bagi perempuan	9	Melaksanakan kegiatan pelatihan memasak dan tata rias	orang	Jumlah Peserta Pelatihan	70	120	154	75	804.000.000	APBD	Kecamatan Situbondo, Panji, Mangaran, Banyuglugur, Arjasa, Asembagus, Wonorejo, Banyuputih	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang Pembelajaran Pereempuan dan Kesetaraan Gender

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
Meningkatkan Advokasi Pernikahan Dini	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi keluarga kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	Psikolog memberikan tes psikologi dan konsoling terhadap calon pengantin usia anak	orang	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan advokasi	60	60	60	60	18.500.000	APBD	Kabupaten Situbondo	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Meningkatkan Edukasi Pernikahan Dini	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	1	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	orang	Jumlah peserta sosialisasi	70	100	100		50.750.000	APBN	Kabupaten Situbondo	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
	/Kota	Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
Meningkatnya Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3973	Melaksanakan pelayanan KB berupa pelayanan kontrasepsi implant,IUD, MOP, MOW, dan caput implan	orang	Jumlah akseptor kesertaan ber KB	3973				1.778.532.779	APBN, APBD	Kabupaten Situbondo	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
Peningkatan kewirausahaan muda pemula	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten /kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	30 Orang	Melakukan kegiatan Pelatihan peningkatan kualitas SDM kepada pemuda yang akan berwirausaha / berwirausaha muda pemula	peserta	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kualitas SDM wirausaha muda pemula			✓		75.000.000	Dana Alokasi Umum	17 Kecamatan	Disparpora	Bidang Kepermudaan
Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	Melaksanakan Pelatihan peningkatan kualitas SDM Pariwisata	peserta	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas SDM Pariwisata			✓		229.925.900	Dana Alokasi Umum	17 Kecamatan	Disparpora	Bidang Pariwisata

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	Melaksanakan Pelatihan peningkatan kualitas SDM Ekonomi Kreatif, Pelatihan penguatan pemasaran produk Ekonomi Kreatif	peserta	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan ekonomi kreatif			√	√	180.000.000	Dana Alokasi Umum	17 Kecamatan	Disparpora	Bidang Ekonomi Kreatif dan Peninjungan SDM
Dinas Kesehatan															
Pemberian PMT Stimulan Stunting	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Memberikan PMT Stimulan Stunting kepada balita stunting Gakin	650 anak	Memberikan Intervensi dan edukasi mengenai makanan gizi seimbang kaya protein hewani	anak	balita stunting			650		201.262.425	DAU	Lokus Stunting	Dinas Kesehatan	Kesmas
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan Nasional Segmen PBPU Pemda	41.294	Melakukan pembayaran Premi Jaminan Kesehatan Nasional ke BPJS Kesehatan	Orang	Masyarakat miskin Kabupaten Situbondo	40.555	41.554	41.419		19.425.000.000	Pajak Rokok	lokus pengentasan Kemiskinan	Dinas Kesehatan	SDK

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
		Pembayaran Klaim SEHATI	17.715	Melakukan pembayaran klaim pelayanan pasien SEHATI dari faskes pemerintah baik dalam kota dan luar kota yang bekerja sama	kunjungan	Masyarakat miskin Kabupaten Situbondo	5.155	3.049	1.505		21.000.000.000	DAU,DB HCHT,Dana Insentif Fiskal	lokus pengentasan Kemiskinan	Dinas Kesehatan	SDK
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman															
Mengurangi Kantong Kemiskinan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0,075 Liter/Detik	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di perdesaan	Liter/Detik	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	√	√	√	√	600.000.000	APBD	Desa di 17 kecamatan	DPUPP	Cipta Karya
Mengurangi Kantong Kemiskinan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1,43 Liter/Detik	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di perdesaan	Liter/Detik	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	√	√	√	√	8.490.000.000	APBD	Desa di 17 kecamatan	DPUPP	Cipta Karya

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
Mengurangi Kantong Kemiskinan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	Pemeliharaan/perbaikan SPAM	Unit	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	√	√	√	√	350.000.000	APBD	Desa di 17 kecamatan	DPUPP	Cipta Karya
Mengurangi Kantong Kemiskinan	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30 Desa	Pembinaan terhadap desa dalam pengelolaan SPAM	Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	√	√	√	√	150.000.000	APBD	Desa di 17 kecamatan	DPUPP	Cipta Karya
Mengurangi Kantong Kemiskinan	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1,39 M ³ /Hari	Pembangunan jamban bagi keluarga miskin	M ³ /Hari	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	√	√	√	√	17.160.000.000	APBD	Desa di 17 kecamatan	DPUPP	Cipta Karya

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
Mengurangi Kantong Kemiskinan	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	267 Rumah Tangga	Pembangunan jamban bagi keluarga miskin	Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	√	√	√	√	2.404.500.000	APBD	Desa di 17 kecamatan	DPUPP	Cipta Karya
Mengurangi Kantong Kemiskinan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	0 Ha	Peremajaan kawasan permukiman kumuh sesuai SK	Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	√	√	√	√	-	APBD	Kawasan kumuh di Kabupaten Situbondo	DPUPP	Perumahan Permukiman
Mengurangi Kantong Kemiskinan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	688 Unit Rumah	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi keluarga miskin	Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	√	√	√	√	10.320.000.000	APBD	Desa di 17 kecamatan	DPUPP	Perumahan Permukiman

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
	(Sepuluh) Ha	man Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki													
Mengurangi Kantong Kemiskinan	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10 KM	Peningkatan jalan untuk daerah terisolir	KM	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	√	√	√	√	11.250.000.000	APBD	Kabupaten Situbondo	DPUPP	Bina Marg a
Mengurangi Kantong Kemiskinan	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3,5 KM	Perbaikan jalan untuk daerah terisolir	KM	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	√	√	√	√	4.200.000.000	APBD	Kabupaten Situbondo	DPUPP	Bina Marg a
Mengurangi Kantong Kemiskinan	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	Perbaikan jembatan untuk daerah terisolir	Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	√	√	√	√	400.000.000	APBD	Kabupaten Situbondo	DPUPP	Bina Marg a

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	13056 KPM	Pemberian bantuan sosial bagi KPM	Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial					2.100.000.00	DAU	Kab. Situbondo	Dinas Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	Pemberian paket permakanan bagi orang yang berada di pengungsian	Orang	Jumlah orang yang mendapat paket permakanan					25.000.000	DAU	Kab. Situbondo	Dinas Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		Pemberian pakaian dan kelengkapan lainnya pada orang yang berada di pengungsian	Orang	Jumlah orang yang mendapat pakaian dan kelengkapan lainnya					7.500.000			Kab. Situbondo	Dinas Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten	0		Pemberian penanganan khusus bagi orang atau kelompok rentan	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan					-	DAU		Kab. Situbondo	Dinas Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
	en/Kota														
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Pelatihan dan Pemberian Alat Ketrampilan kerja bagi Wanita yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga	Orang	Jumlah Alat Ketrampilan Kerja yang diberikan					-	DAU	Kab. Situbondo	Dinas Sosial	Bidang Pemb erdayaan Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Pemberian Alat Bantu Mobilitas bagi Disabilitas Guna Menunjang Fungsi Sosial	Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang Diberikan					-	DAU	Kab. Situbondo	Dinas Sosial	Bidang Reabilitasi Sosial

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten /Kota	0	Pengiriman Klien ke UPT Provinsi guna pemberian bimbingan fisik mental dan ketrampilan bagi PMKS	Kali	Jumlah klien yang dikirimkan ke UPT Provinsi					-	DAU	Kab. Situbondo	Dinas Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan atkan sosialisasi dan pembinaan	350 orang	Pelatihan Pembuatan Kue	orang	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan	350				730.000.000	DAU	Kecamatan Arjasa, Jangkar, Suboh, Kapongan, Panji dan Asembagus.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Usaha Mikro
--	---	---	-----------	-------------------------	-------	---	-----	--	--	--	-------------	-----	--	---	-------------

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota	Jumlah pasar murah yang dilaksanakan	20 kali	Pasar Murah	kali	Jumlah pasar murah yang dilaksanakan	10		10		350.000.000	DAU	Kecamatan Situbondo, Kecamatan Panji dan Kecamatan Sumbermalang	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI I	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pendampingan /pelatihan IKM Yang dilaksanakan	7 kali	Pelatihan Produk olahan ikan, Pelatihan Olahan Kue dan roti, Pelatihan Pembuatan Batako, Pelatihan Pengelasan berbahan dasar pipa, dan pelatihan bagi wira usaha baru.	kali	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	2	5			1.075.000.000	DAU	Kecamatan Situbondo, Kecamatan Panji, Kecamatan Panarukan, Kecamatan Kendit dan Asembagus	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan															
Peningkatan literasi masyarakat	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan dengan lomba bertutur dan festival literasi	4 Lokus	Melakukan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan dengan lomba bertutur dan festival literasi	Lokus	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan					Rp -	APBD	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bidang Perpustakaan

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
Pengembangan layanan perpustakaan rujukan di Kab. Situbondo	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	4 Layanan	Melakukan layanan perpustakaan dengan inovasi Pantura Mas, Becak Mapan, Pusling, dan pelayanan perpustakaan di Perpusda Situbondo dan RTH Asembagus.	Layanan	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	√	√	√	√	Rp 59.553.600	APBD	27 Kecamatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bidang Perpustakaan
Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan bahas pustaka dengan pengadaan bahan bacaan berupa buku cetak maupun elektronik	140 Eksemplar	Melakukan pengelolaan dan pengembangan bahas pustaka dengan pengadaan bahan bacaan berupa buku cetak maupun elektronik	Eksemplar	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		√			Rp 42.045.825	APBD	Perpustakaan daerah Kab. Situbondo dan Perpustakaan RTH Kec. Asembagus	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bidang Perpustakaan

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
Peningkatan literasi masyarakat	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	5 Perpustakan	Melakukan pelatihan replikasi desa berbasis inklusi sosial di Perpustakaan desa	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan		✓			Rp20.213.675	APBD	5 Desa di Kab. Situbondo	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bidang Perpustakaan
Dinas Perhubungan															
Penyelenggaraan Lalu Lintas	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah PJU yang terpasang di Kabupaten Situbondo	1518 PJU	Pengadaan dan Pemasangan PJU di Kabupaten Situbondo	Unit	Jumlah PJU yang terpasang di Kabupaten Situbondo	370	370	370	408	33.208.855.260	DAU	Kabupaten Situbondo	Dinas Perhubungan	Bidang Sarana dan Prasarana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan	Jumlah keluarga penerima manfaat yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya	3 Desa/ 180 KPM	Pembinaan terhadap KPM yang sudah memiliki usaha dan yang akan memulai usaha	180 KPM / 3 Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang meingkat pendapatannya	-	-	15.000.000	5.000.000	Rp20.000.000	APBD Provinsi	Desa Kesambirampak Kec. Kapongan, Desa Talkandang Kec. Situbondo, Desa Paowan Kec. Panarukan	DPMD	Bina Pemb erdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
	ahan dan masyarakat hukum adat														
Program Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur Pemberdayaan BUM Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Lembaga BUM Desa yang menerima bantuan	4 Desa	Pelatihan penguatan kelembagaan dan tata kelola BUM Desa	Pengurus BUM Desa	Prosentase pengurus lembaga BUM Desa yang memahami pengelolaan usaha BUM Desa	20.000.000	25.000.000	35.000.000	20.000.000	100.000.000	APBD Provinsi	Desa Wrnginanom Kec. Panarukan, Desa Plalangan Kec. Sumbermalang, Desa Perante Kec. Asembagus, Desa Gunung Malang Kec. Suboh	DPMD	Pembangunan Desa
					Pengurus BUM Desa	Prosentase BUM Desa berbadan Hukum	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	APBD Provinsi	Desa Gunung Malang Kec. Suboh	DPMD	Pembangunan Desa
					Lembaga BUM Desa	Prosentase lembaga BUM Desa	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	35.000.000	APBD Provinsi		DPMD	Pembangunan Desa

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	5 Laporan	Melakukan Pelayanan Pendaftaran Penduduk keliling ke Desa dan sekolah	Perse	Prosentase terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	25%	25%	25%	25%	15.356.490,00	DAU	KAB. SITUBONDO	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK
Dinas Komunikasi dan Informatika															
Meningkatkan Pendapat an	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	12 Dokumen	Penyediaan Portal Satu data	1 Paket	Jumlah Penyediaan Portal Satu data		1			15.715.350	DAU	Kab. Situbondo	Dinas Kominfo	Bidang Persandian
	Jumlah penyediaan Data Sektoral sesuai SK bupati mengenai daftar data yang disepakati	721 Dataste	Penyediaan Portal Satu data	dataset	Jumlah Data set yang terpublikasi	360	431	71			48.769.600,00	DAU	Kab. Situbondo	Dinas Kominfo	Bidang Persandian

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
		ti antara OPD selaku Produsen data dan BPS selaku pembina data													
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Layanan Keamanan Informasi	44 Perangkat daerah	Layanan terhadap penjaminan terhadap Keamanan Informasi	44 Opd	Jumlah perangkat daerah yang menerima layanan Keamanan Informasi	44	44	44	44	124.790.566	DAU	Kab. Situbondo	Dinas Kominfo	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	Sosialisasi PPID Desa/Kel	136 Desa	Jumlah Peserta Sosialisasi PPID Desa/Kel		136			53.185.000	DAU	Kab. Situbondo	Dinas Kominfo	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
				Bimtek PPID	43 OPD	Jumlah Peserta Bimtek PPID			43						
				Sosialisasi SP4N Lapor	50 Orang	Jumlah Peserta Sosialisasi SP4N_Lapor		50							
	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten	12 Dokumen	Penyebarluasan Informasi dan Kontra Hoax	12 Paket	Jumlah Paket Penyebarluasan Informasi dan Kontra Hoax	3	3	3	3	2.025.000.000	DAU	Kab. Situbondo	Dinas Kominfo	Bidang Komunikasi dan Informasi

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
		dan Perencanaan Media Komunikasi Publik												masi Publik	
					Publikasi/Iklan	80 Paket	Jumlah Paket Publikasi/Iklan	20	20	20					
					Publikasi/Iklan Berbayar Media Sosial Pemkab.	10 Paket	Jumlah Paket Publikasi/Iklan Berbayar Media Sosial Pemkab.	2	2	2					
					Publikasi Website dan Medsos	10 Paket	Jumlah Paket Publikasi Website dan Medsos	2	2	2					
					Tata Kelola Website dan Medsos	16 Paket	Jumlah Paket Tata Kelola Website dan Medsos	4	4	4					
Dinas Ketenagakerjaan															
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	12 orang		Pelaksanaan Perlindungan PMI melalui fasilitasi penjemputan PMI dari BP2MI menuju daerah asal	Orang	Jumlah PMI yang Dilindungi	3	3	3	3	50.000.000	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Situbondo	Disnaker	Pemimpinan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 orang	Pelaksanaan pelatihan bagi tenaga kerja melalui program perluasan kesempatan kerja	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		20			100.000.000	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Situbondo	Disnaker	Pemparan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	25 orang	Sosialisasi tentang unit layanan disabilitas bagi penyandang disabilitas	Orang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	25				25.000.000	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Situbondo	Disnaker	Pemparan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi	Jumlah Pencari kerja yang Mendapat Pelatihan	126 Orang	Melaksanakan Pelatihan bagi pencari kerja melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi	Orang	Jumlah Pencari kerja bagi masyarakat yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	30	32	32	32	977.000.000,00	Musrenbang, Pokir dan DBHCHT	Kabupaten Situbondo	Disnaker	Bidang Pelatihan Kerja, Produktifitas dan

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator Berbasis Kompetensi	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
					Orang	Jumlah Pencari kerja bagi masyarakat miskin yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	8	4	4	4					Transmigrasi
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	50 Lembaga	Monitoring dan pendampingan akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta	Lembaga	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang mendapat pendampingan	50				3.000.000	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Situbondo	Disnaker	Bidang Pelatihan kerja, produktifitas dan transmigrasi
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta	1 Dokumen	Melaksanakan rapat koordinasi tentang penghitungan UMK bersama Dewan Pengupahan	Dokumen	Jumlah Dokumen UMK yang diterbitkan	0	0	0	1	69.392.980	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Situbondo	Disnaker	Hubungan Industrial
		12 Laporan	Melaksanakan penghimpunan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	Laporan	Jumlah laporan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	3	3	3	3						
	120 Perusahaan	Melaksanakan sosialisasi tentang UMK	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mendapat sosialisasi tentang UMK	0	0	0	120							

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
		Pengupahan													
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Ber dampak pada Kepentingan dil (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Kasus	Melaksanakan fasilitasi pencegahan perselisihan hubungan industrial	Perkara	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang dicegah	5	5	5	5	81.500.000	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Situbondo	Disnaker	Hubungan Industrial

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselasaikan	10 Perkara	Melaksanakan penerimaan pengaduan hubungan industrial dan penanganan perselisihan hubungan industrial	Perkara	Jumlah Perselisihan PHK, Hak, Kepentingan atas Serikat Pekerja yang dicegah/diselesaikan	2	2	2	4	25.637.400	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Situbondo	Disnaker	Hubungan Industrial

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100%		15	Unit			v		1.656.000.000	DAU	Kab. Situbondo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang DIKDA
Mengurangi Beban Pengeluaran	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	100%		444	Satuan Pendidikan	v	v	v	v	42.386.580.000	BOSP Pusat	Kab. Situbondo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang DIKDA

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100%		2	Ruang			v		300.000.000	DAU	Kab. Situbondo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang DIKDAYAS
Mengurangi Beban Pengeluaran	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelesaangkan Proses Belajar	100%		426	Satuan Pendidikan		v			220.000.000	DAU	Kab. Situbondo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang DIKDAYAS
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100%		12	ruang			v		1.581.000.000	DAU	Kab. Situbondo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang DIKDAYAS
Mengurangi Beban Pengeluaran	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100%		218	Peserta didik	v				113.500.000	DAU	Kab. Situbondo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang DIKDAYAS

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100%		1	Unit			v		100.000.000	DAU	Kab. Situbondo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang DIKDAYAS
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	100%		1	ruang			v		100.000.000	DAU	Kab. Situbondo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang DIKDAYAS
Mengurangi Beban Pengeluaran	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100%		140	Peserta didik		v			145.000.000	DAU	Kab. Situbondo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang DIKDAYAS
Mengurangi Beban Pengeluaran	Pengelolaa n Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Mengelol	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelol	100%		96	Satuan Pendidikan	v	v	v	v	24.220.310.000	BOSP Pusat	Kab. Situbondo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang DIKDAYAS

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
		a Dana BOS													
Mengurangi Beban Pengeluaran	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100%		750	Satuan Pendidikan	v				5.308.670.00	DAU	Kab. Situbondo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang DIKDAYA
Mengurangi Beban Pengeluaran	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100%		5000	Peserta didik	v				150.000.000	DAU	Kab. Situbondo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang PAUD dan DIKM AS
Mengurangi Beban Pengeluaran	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	100%		797	Satuan Pendidikan	v	v	v	v	12.327.105.000	BOSP Pusat	Kab. Situbondo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang PAUD dan DIKM AS
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100%		3	Ruang			v		525.000.000	DAU	Kab. Situbondo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang PAUD dan DIKM AS

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	100%		4	Ruang			v		440.000.000	DAU	Kab. Situbondo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS
Mengurangi Beban Pengeluaran	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100%		155	Peserta didik		v			3.283.800.000	Pajak Rokok	Kab. Situbondo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS
Mengurangi Beban Pengeluaran	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	100%		24	Satuan Pendidikan	v	v	v	v	2.060.100.000	BOSP Pusat	Kab. Situbondo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100%		1	Ruang			v		200.000.000	DAU	Kab. Situbondo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS

Program Kemiskinan	Sub Kegiatan Nomenklatur	Indikator	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Sumber Pendanaan	Fokus Lokasi	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator / PD	Pelaksana / Bidang
Mengurangi Beban Pengeluaran	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100%		24	Satuan Pendidikan		v			1.750.000.00	DAU	Kab. Situbondo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo, maka dokumen Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan tahun 2025 merupakan sebuah strategi dan pedoman serta tools bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengakselerasi pencapaian indikator kinerja utama yakni kemiskinan yang ditargetkan.

Selanjutnya, untuk penyusunan program dan kegiatan serta rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen RAT Kemiskinan Kabupaten Situbondo, telah dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam merespon harapan masyarakat. Dalam implementasi program dan kegiatan serta rencana aksi komitmen pimpinan menjadi kunci kesuksesan yang dapat menghadirkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel dan berbasis digital serta berdampak. Selain itu juga diperlukan adanya sinergi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo.

Meskipun dalam dokumen ini sudah menguraikan rencana aksi setiap program kemiskinan, namun dalam perjalanan dan pelaksanaanya dengan dinamika isu strategis pembangunan tidak menutup kemungkinan diperlukan penambahan inovasi untuk menjawab berbagai permasalahan strategis. Oleh karena itu keberadaan tim evaluator internal (APIP) Pemerintah Kabupaten Situbondo sangat penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan atau setiap triwulan agar dapat mengukur ketercapaian rencana aksi. Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) berkewajiban mensosialisasikan dokumen RAT Kemiskinan Kabupaten Situbondo tahun

2025 kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan stakeholder terkait. Hal ini menjadi penting karena melalui penetapan RAT Kabupaten Situbondo tahun 2025 dapat dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI